



BAPPENAS

Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional /Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional

DESA WISATA 3.0

INDEKS DESA WISATA BERKETAHANAN





BAPPENAS

Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional /Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional

DESA WISATA 3.0

INDEKS DESA WISATA BERKETAHANAN

PENGHARGAAN

Pada akhir tahun 2023 BAPPENAS menyelenggarakan diskusi terkait dengan pengembangan desa wisata untuk memperkaya materi RPJPN 2025-2045. Diskusi tidak hanya bersifat evaluasi atas apa yang telah dilakukan selama ini namun juga membuka pandangan baru merespons pergeseran paradigma pembangunan pariwisata masa depan.

Membangun kemandirian desa wisata menjadi kesimpulan penting di akhir diskusi tersebut. Keluaran diskusi adalah menyiapkan alat penilaian mandiri bagi pengelola desa wisata agar dapat digunakan sebagai alat evaluasi dan program pengembangan secara mandiri.

Terima kasih kepada Bapak Ignasius Angger Anindito dari BAPPENAS yang telah memberikan izin untuk membagikan hasil diskusi ini kepada berbagai pihak guna memperkaya berbagai referensi yang telah ada.

Terimakasih pula pada Tim Bappenas, Tim Diskusi Review RPJMN, dan Tim Desa Wisata -- pak Tatak Sariawan Candirejo, mas Pahrul Bilebante, mas Sugeng Nglanggeran, dan mas Galuh Tinalah -- serta semua pihak yang telah memberikan kontribusi pemikiran bagi pengayaan materi diskusi.

Materi ini merupakan ringkasan dari laporan akhir aslinya. Semoga pandangan baru sebagaimana tertuang dalam ringkasan hasil diskusi yang lalu dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, April 2024.

Penulis

Henky Hermantoro.

PENDAHULUAN

Desa merupakan sebuah entitas sosial dan ekonomi yang masih sarat menyimpan nilai-nilai kehidupan tradisi lokal. Berkembangnya pariwisata akhir-akhir ini menyentuh pula kehidupan desa yang ada. Desa kemudian berkembang, dan dikembangkan, menjadi sebuah destinasi pariwisata dengan istilah desa wisata. Tumbuhnya desa wisata dapat memberi harapan baru bagi perkembangan pariwisata nasional. Harapannya adalah bahwa pertumbuhan pariwisata di desa dapat pula mempercepat terwujudnya desa mandiri sebagai diamanatkan oleh UU no.6 Tahun 2014¹.

Pemikiran ini menyebabkan banyaknya dukungan mengarah pada pertumbuhan desa wisata. Sejak 1 (satu) dekade lalu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, juga Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, telah mendorong tumbuhnya desa wisata. Hasilnya jumlah desa/kampung wisata meningkat pesat. Dari sebanyak 1.838 desa/kampung wisata di tahun 2021 (Asidewi, 2021)² menjadi 5.487 desa/kampung wisata di tahun 2024 (Jadesta, 2024)³.

Ketika desa wisata didorong tumbuh maka timbul persoalan baru. Semangat desa wisata untuk menarik kunjungan sebanyak-banyaknya berakibat pada timbulnya dampak negatif bagi kehidupan desa wisata yang bersangkutan. Ketika tidak dikelola dengan baik pertumbuhan pariwisata justru mendegradasi kualitas lingkungan desa wisata yang bersangkutan.

Pandemi Covid-19 yang terjadi antara tahun 2020-2023 memberikan pelajaran berharga bagi desa/kampung wisata. Mereka yang bertumpu sepenuhnya pada pariwisata mengalami persoalan berat dengan tiadanya kunjungan wisatawan. Sebaliknya mereka yang masih tetap berpegang pada mata pencaharian pokok terutama pertanian, dan menjadikan usaha pariwisata sebagai pekerjaan sampingan, dapat tetap bertahan (Raharjana & Al Ansori (2020)⁴.

Pengalaman ini telah membangunkan kesadaran baru. Pengembangan pariwisata di desa tidak harus mengorbankan nilai lingkungan alam, sosial budaya dan ekonomi lokal. Nilai lokal tersebut justru menjadi daya saing sekaligus menjaga kekuatan desa untuk tetap bertahan terhadap berbagai persoalan yang ada. Faktor ketahanan desa tersebut justru menjadi syarat utama bagi pembangunan desa sebagaimana diamanatkan oleh UU No.6 Tahun 2014⁵.

Dengan pengalaman yang ada, saat ini prinsip ketahanan desa (*resilience*) menjadi bagian penting dalam konsep pembangunan desa wisata berkelanjutan (*sustainability*). Faktor ketahanan tersebut melengkapi konsep keberlanjutan sebagaimana yang telah diinisiasi oleh berbagai badan dunia termasuk UNESCO (nd)⁶ dan WEF (2022)⁷.

Konsep Desa Wisata Berketahanan tidak hanya ditujukan untuk membangun prinsip ketahanan desa namun lebih dari itu adalah membangun komunitas yang kompeten. Sebuah komunitas yang terlibat penuh dan mampu

¹ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Desa*.

² Asidewi (Asosiasi Desa Wisata) (2021) Dikutip dari <https://travel.kompas.com/read/2021/08/01/180600927/berapa-jumlah-desa-wisata-di-indonesia-?page=all>

³ Jadesta (2023). Dikutip dari <https://jadesta.kememparekraf.go.id/sebaran>. Tgl. 13 April 2024.

⁴ Raharjana, D.T. & Al Anshori, H.A. (2020). *Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Desa/Kampung Wisata di Indonesia*. Yogyakarta: Desa Wisata Institut

⁵ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Desa*.

⁶ UNESCO (nd). *Sustainable and Resilient Tourism*. Dikutip dari https://en.unesco.org/sites/default/files/info_sheet_sustainable_tourism.pdf

⁷ WEF (World Economic Forum) (2022). *Travel & Tourism Development Index 2021: Rebuilding for Sustainable and Resilient Future*. Geneva: WEF.

mendayagunakan sumber daya mereka untuk mengatasi persoalan yang dihadapinya.

Untuk menjelaskan gagasan mengenai pembangunan desa wisata berketahanan tulisan ini disusun sebagai berikut.

Pertama, bahasan tentang pembangunan desa menjelaskan hal tujuan dan permasalahan, serta upaya untuk mendorong terwujudnya desa mandiri.

Kedua, bahasan tentang perkembangan desa wisata menjelaskan posisi desa wisata dalam sistem pariwisata dan kepariwisataan, serta perkembangannya

Ketiga, bahasan desa wisata berkelanjutan menjelaskan tentang konsep dan perbedaannya dengan konsep-komsep pembangunan desa wisata sebelumnya.

Keempat, bahasan tentang tata cara penilaian desa wisata berketahanan menjelaskan tentang konsep dan elemen-elemen pendukungnya.

Kelima, bahasan tentang metode penilaian dan tahapan pelaksanaan menjelaskan tentang cara penilaian dan tahapan untuk mencapai bentuk desa wisata berketahanan yang diinginkan.

DAFTAR ISI

PENGANTAR – i

PENDAHULUAN – ii

I. PEMBANGUNAN DESA – 1

I.1. Tujuan dan Permasalahan Utama - 1

1. Tujuan Pembangunan Desa - 1
2. Permasalahan Desa – 1

I.2. Membangun Desa Mandiri Berketahanan - 2

1. Prinsip Pembangunan Desa - 2
2. Desa Mandiri Berketahanan - 2
3. Penilaian Status Desa - 3

II. PERKEMBANGAN DESA WISATA – 5

II.1. Pariwisata dan Kepariwisataaan - 5

1. Sistem Pariwisata dan Kepariwisataaan - 5
2. Desa Wisata dalam Sistem Perwilayahan Pariwisata - 6

II.2. Perkembangan Pembangunan Desa Wisata - 7

1. Penilaian Desa Wisata - 7
2. Pergeseran Paradigma Desa Wisata - 7

III. PEMBANGUNAN DESA WISATA BERKETAHANAN – 9

III.1. Konsep Pembangunan Desa Wisata Berketahanan - 9

1. Konsep Dasar Pembangunan Desa Wisata Berketahanan - 9
2. Perbedaan antar Konsep Desa Wisata – 9

IV. PENILAIAN DESA WISATA BERKETAHANAN – 12

IV.1. Konsep Penilaian – 12

1. Tujuan Penilaian Mandiri – 12
2. Persoalan yang Dihadapi - 12

IV.2 Elemen Penilaian - 13

1. Struktur Penilaian – 13

2. Pilar Utama – 14

3. Kriteria dan indikator - 14

V. METODE PENILAIAN DAN TAHAPAN PELAKSANAAN – 17

V.1. Metode Penilaian – 17

1. Penilaian Indeks Ketahanan – 17
2. Uji Penilaian - 18
3. Tahapan Penilaian Mandiri – 18

V.2. LANGKAH TINDAKAN - 19

1. Melakukan Penilaian Mandiri – 19
2. Menyiapkan Arah Kebijakan Program menuju Ketahanan Desa – 19
3. Memperkuat Kelembagaan -20
4. Menyiapkan Rencana Pembangunan Desa Wisata Berketahanan - 20
5. Membangun Kemitraan – 20
6. Merancang Paket Wisata – 21
7. Menyusun Strategi Pemasaran – 21
8. Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan - 22

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Jumlah Penduduk Miskin di Perdesaan Tahun 2012-2023 (Juta Orang – 1

Gambar 2. Penetapan Status Desa - 3

Gambar 3. Status Desa Tahun 2019-2023 – 4

Gambar 4. Sistem Pariwisata - 5

Gambar 5. Sistem Kepariwisataaan – 6

Gambar 6. Sistem Perwilayahan - 6

Gambar 7. Status Desa Wisata Tahun 2023 – 7

Gambar 8. Pergeseran Paradigma Desa Wisata - 8

Gambar 9. Elemen Penilaian Desa Wisata Berketahanan – 13

Gambar 10. Tahapan Penilaian - 17

Gambar 11. Alur Kerja Penilaian – 18

Gambar 12. Langkah Pengembangan – 19

DAFTAR TABEL

- Tabel 1. Perbedaan Konsep Pembangunan
Desa Wisata – 10
- Tabel 2. Perbandingan Konten Penilaian
antar Pedoman - 13
- Tabel 3. Pilar, Kriteria, dan Indikator - 15

GLOSARI – 23

REFERENSI - 25

KONTRIBUTOR – 26

LAMPIRAN - 26

Kuesioner

I. PEMBANGUNAN DESA



I.1. TUJUAN DAN PERMASALAHAN UTAMA

1. Tujuan Pembangunan Desa

Tujuan pembangunan desa tidak hanya terkait dengan pembangunan ekonomi namun juga sosial dan budaya lokal menuju desa mandiri. Dalam hal ini UU no. 6 Tahun 2014¹ menetapkan tujuan pembangunan desa diarahkan untuk:

- Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa;
- Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama;
- Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;

¹ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Di atas adalah cuplikan dari kelengkapan asas yang ada di undang-undang.

- Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

2. Permasalahan Desa

Tingginya angka penduduk miskin di desa saat ini masih merupakan persoalan utama yang dihadapi oleh desa. Data yang tersedia menunjukkan masih besarnya angka kemiskinan di desa. Tahun 2019 tercatat penurunan jumlah penduduk miskin yang signifikan dibanding tahun 2012.

Namun pandemi Covid-19 pada akhir tahun 2019 telah mengakibatkan peningkatan jumlah penduduk miskin di perdesaan. Tahun 2020 tercatat peningkatan jumlah penduduk miskin sebesar 4% namun terjadi kecenderungan penurunan lagi pada tahun 2023 (BPS, 2023a;² BPS, 2023b³). Pergerakan tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Jumlah Penduduk Miskin di Perdesaan Tahun 2012-2023 (Juta Orang).



Sumber: BPS, 2023. Dari berbagai publikasi.

² BPS (2023a). *Persentase Penduduk Daerah Perkotaan menurut Provinsi, 2010-2035*. Dikutip dari bps.go.id.

³ BPS (2023b). *Berita Resmi Statistik*. No. 47/07/Th. XXVI, 17 Juli 2023.

Faktor-faktor penyebab kemiskinan tersebut antara lain adalah (Kurniawati, 2017)⁴:

1. Rendahnya kualitas angkatan kerja yang berdampak pada produktivitas tenaga kerja;
2. Ketergantungan pada sektor primer dengan produktivitas rendah;
3. Sulitnya akses terhadap kepemilikan modal;
4. Rendahnya penguasaan teknologi;
5. Inefisiensi penggunaan sumber daya; dan
6. Besarnya arus migrasi desa-kota akibat terbatasnya lapangan kerja di desa.

Di samping penyebab terjadinya kemiskinan seperti tersebut di atas, proses urbanisasi⁵ yang terjadi juga menyebabkan terjadinya konversi lahan pertanian ke nonpertanian. Jumlah konversi lahan tersebut sangat luas. Tercatat sekitar 90-10 ribu ha lahan pertanian beralih fungsi dari fungsi pertanian per tahun (Noor, 2023)⁶.

Perubahan fungsi lahan tersebut tidak saja mengakibatkan perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat namun juga ruang saujana (*cultural landscape*) desa dan mengurangi dukungan desa sebagai penyangga pangan nasional. Terganggunya pasokan produk pertanian desa tidak hanya akan mengganggu kehidupan desa namun juga kota (Wanusmawatie & Purnomo, 2020)⁷

I.2. MEMBANGUN DESA MANDIRI

1. Prinsip Pembangunan Desa

Pembangunan di desa dilakukan atas dasar prinsip desa membangun dan bukan membangun desa (UU no.6 Tahun 2014)⁸. Prinsip desa membangun menegaskan bahwa desa dibangun atas inisiatif masyarakat lokal untuk mencapai kemandirian desa yang dibangun di atas pilar-pilar ketahanan desa.

Konsep pembangunan desa berkelanjutan pada hakikatnya tidak mengubah kehidupan sosial ekonomi desa namun memperkuat ketahanan desa (Kemendes, 2023)⁹. Konsep tersebut dijabarkan dalam 18 tujuan SDGs (*Sustainable Development Goals*)¹⁰ Desa dengan mendorong perhatian pada kesadaran atas pelestarian dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan desa.

Prinsip pembangunan desa di atas menjadi acuan bagi pembangunan lintas sektor. Untuk itu koordinasi lintas sektor menjadi unsur penting dalam pembangunan desa.

2. Desa Mandiri Berketahanan

Tujuan akhir pembangunan desa adalah mewujudkan desa mandiri yang mampu memecahkan persoalannya sendiri berbasis pada sumber daya desa. Desa mandiri adalah desa berketahanan yang mampu menghadapi berbagai krisis untuk menjaga keberlangsungan

⁴ Kurniawati (2017). *Analisis Faktor Penyebab Kemiskinan Di Desa Kembang Ayun Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah*. Program Studi Ekonomi Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Dengan berbagai sumber lainnya.

⁵ Urbanisasi merupakan perubahan kehidupan sosial ekonomi masyarakat perdesaan ke perkotaan.

⁶ Noor, A.F. (2023). Alih Fungsi Lahan Pertanian Tembus 100 Ribu Hektare per Tahun. Mengutip informasi dari Kementerian Pertanian Dikutip dari <https://ekonomi.republika.co.id/berita/rnt9jv490/alih-fungsi-lahan-pertanian-tembus-100-ribu-hektare-per-tahun>.

⁷ Wanusmawatie, I & Purnomo, M. (2020). Dynamic Model of Resilient Village (Kampung Tangguh) System in the New Normal. Dalam *Advances in Economics, Business and Management Research*, volume 191 Proceedings of the 3rd Annual International Conference on Public and Business Administration (AICoBPA 2020)

⁸ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Desa*.

⁹ Kemendes (Kementrian Desa, PDT, dan Transmigrasi (2023). Dari <https://sid.kemendes.go.id/sdgs>

¹⁰ Dikutip dari <https://sdgs.ub.ac.id/inacol-sdgs/18-goals-kemendes/>. 18 SDGs dapat dilihat pada lampiran

hidup dan kehidupan masyarakatnya (ldnet.eu, nd)¹¹.

Ukuran ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi yang digunakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDDT, 2016)¹² dirinci dalam beberapa dimensi sebagaimana berikut:

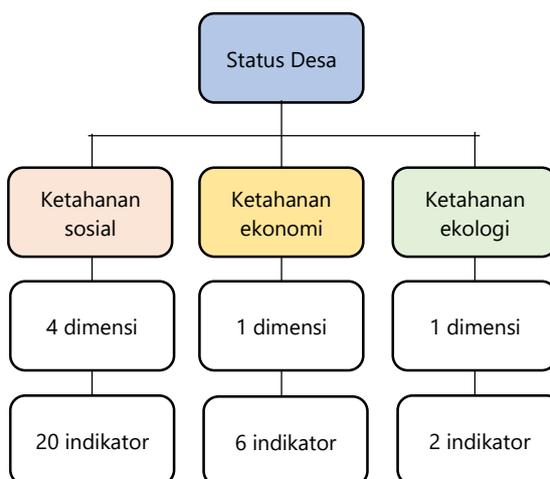
- Ketahanan sosial terdiri dari dimensi modal sosial, kesehatan, pendidikan, dan permukiman;
- Ketahanan ekonomi terdiri dari dimensi ekonomi; dan
- Ketahanan ekologi terdiri dari dimensi ekologi.

Konsep kemandirian desa yang dibangun di atas pilar-pilar ketahanan tersebut merupakan bagian dari pembangunan desa berkelanjutan. Konsep pembangunan yang tidak hanya menjaga keselarasan pembangunan lingkungan, sosial, dan ekonomi namun juga memperkuat ketahanan desa dalam menghadapi berbagai krisis.

3. Penilaian Status Desa

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menetapkan status desa atas dasar penilaian terhadap indeks ketahanan desa (Permendes PDDT, 2016)¹³. Rincian dimensi, dan indikator dari tiap-tiap pilar dapat dilihat pada Gambar 2¹⁴.

Gambar 2. Penetapan Status Desa.



Sumber: Permendes PDDT Nomor 2 Tahun 2016.

Hasil penilaian akhir akan menentukan status desa yang merupakan indeks komposit dari masing-masing indeks ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi. Hasilnya adalah penetapan status desa dengan catatan:

- Desa mandiri (desa swasembada) adalah desa maju yang mampu melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi;
- Desa maju (desa pra sembada) adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan mampu menanggulangi kemiskinan;
- Desa berkembang (desa madya) adalah desa potensial menjadi desa maju yang memiliki potensi sumber daya sosial ekonomi, dan

¹¹ ldnet.eu (nd). Dikutip dari <https://ldnet.eu/resilience-and-its-core-principles-the-key-to-sustainable-rural-development/#:~:text=Once%20the%20complex%20and%20adaptive,crisis%20processes%2C%20to%20undergo%20change>

¹² Permendes PDDT Nomor 2 Tahun 2016 tentang *Indeks Membangun Desa*.

¹³ Permendes PDDT Nomor 2 Tahun 2016 tentang *Indeks Membangun Desa*.

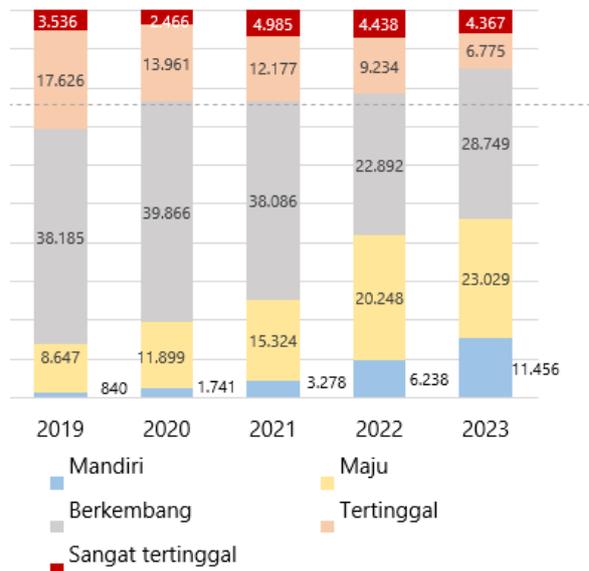
¹⁴ Rincian pilar, dimensi, dan indikator dapat dilihat pada Permendes PDDT Nomor 2 Tahun 2016 tentang *Indeks Membangun Desa*.

ekologi tetapi belum dapat mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan;

- d. Desa tertinggal (desa pra madya) adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial ekonomi dan ekologi tetapi belum, atau kurang mampu mengelola untuk tujuan peningkatan bagi kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya; dan
- e. Desa sangat tertinggal (desa pratama) adalah desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi serta mengalami kemiskinan dalam segala bentuk

Gambar 3 di bawah ini menunjukkan perkembangan jumlah desa mandiri yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Antara tahun 2019 sampai tahun 2023 tercatat peningkatan status desa mandiri sebesar 12,6%. Status desa tersebut digunakan oleh Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi untuk memotivasi BUM Desa, BUM Desa Bersama atau yang bekerja sama dengan pihak ketiga untuk mendorong pembangunan pariwisata di desa.

Gambar 3. Status Desa Tahun 2019-2023.



Sumber: www.idm.kemendes.go.id.

Di samping itu status desa tersebut digunakan pula untuk pemberian penghargaan Desa Wisata Nusantara 1 untuk desa dengan status sangat tertinggal, tertinggal, dan berkembang dan Desa Wisata Nusantara 2 untuk desa wisata dengan status maju dan mandiri¹⁵.

¹⁵ Sebagai catatan, kriteria yang digunakan dalam status desa mandiri disini berbeda dengan status desa wisata

mandiri yang ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

II. PERKEMBANGAN DESA WISATA



II.1. PARIWISATA DAN KEPARIWISATAAN

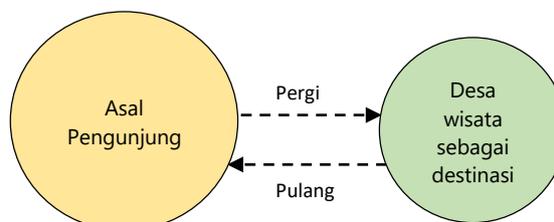
1. Sistem Pariwisata dan Kepariwisataan

Pariwisata adalah kegiatan perjalanan untuk tujuan rekreasi serta dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang diperlukan oleh wisatawan selama tinggal di destinasi pariwisata (UU No.10 Tahun 2009). Proses ini membangun sistem pariwisata yang terbentuk karena adanya faktor permintaan (*demand*) dan faktor penawaran (*supply*)¹⁶. Kesempurnaan sistem pariwisata ini terjadi ketika terjadi keseimbangan antara faktor permintaan dengan faktor penawaran (*demand-supply matching*).

Dalam sistem ini posisi desa wisata adalah sebagai faktor penawaran. Desa wisata merupakan destinasi tujuan wisata yang disiapkan untuk menerima kunjungan, baik dalam status pengunjung sebagai wisatawan (*tourist*) maupun pelancong (*excursionist, sameday traveler, atau day*

tripper)¹⁷. Gambar 4 memberikan ilustrasi sistem pariwisata tersebut.

Gambar 4. Sistem Pariwisata.



Penjelasan gambar di atas adalah:

- Pengunjung desa wisata dapat dengan status wisatawan (menginap) atau pelancong (pergi pulang);
- Desa wisata merupakan tujuan kunjungan sehingga memerlukan kesiapan penyediaan barang dan jasa bagi pengunjung selama tinggal di desa wisata; dan
- Elemen yang diperlukan bagi desa wisata sebagai sebuah destinasi pariwisata adalah daya tarik wisata alam dan budaya, fasilitas umum (kesehatan dsb), fasilitas pariwisata (akomodasi, makan minum, transportasi lokal dsb), aksesibilitas (sistem transportasi lokal), dan masyarakat (UU No.10 Tahun 2009)¹⁸.

Destinasi pariwisata merupakan salah satu pilar pembangunan kepariwisataan. Untuk itu pembangunan kepariwisataan di desa tidak terlepas dari keterpaduan pengembangan pilar destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan (UU No.10 Tahun 2009). Keterkaitan pilar-pilar kepariwisataan dapat dilihat pada Gambar 5 berikut.

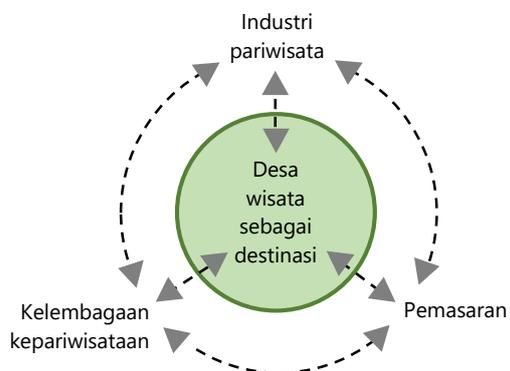
¹⁶ Sering pula digunakan istilah pasar dan produk. Pasar merupakan sisi permintaan dan produk merupakan sisi penawaran.

¹⁷ Perbedaan pengertiannya dapat di lihat dalam UNWTO, 2008. UNWTO (United Nations World Tourism

Organization) (2008). *International Recommendations for Tourism Statistics 2008*. Madrid: UNWTO.

¹⁸ Aksesibilitas antara asal pengunjung dengan desa wisata disiapkan oleh tingkatan pemerintahan di atasnya sesuai dengan kewenangannya (UU No. 24 Tahun 2014).

Gambar 5. Sistem Kepariwisataan.



Sumber: UU No. 10 Tahun 2009.

Penjelasan gambar di atas adalah:

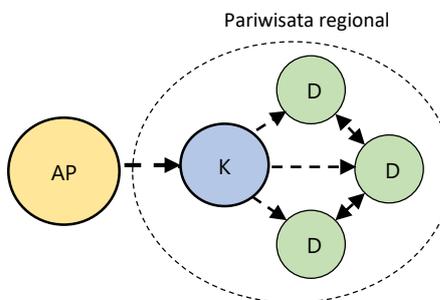
- Sebagai sebuah destinasi pariwisata maka desa wisata memerlukan kesiapan beberapa elemen dasar berupa daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, dan masyarakat;
- Industri pariwisata merupakan kumpulan usaha pariwisata (*homestay*, pemandu wisata dsb) di desa dalam skala UMKM¹⁹;
- Pemasaran merupakan cara mengenalkan desa wisata beserta produknya kepada segmen pasar sasaran;
- Kelembagaan merupakan bentuk lembaga komunitas yang ada di desa wisata, yaitu BUMDes, Koperasi, atau Pokdarwis.

2. Desa Wisata dalam Sistem Perwilayahan Pariwisata.

Di samping sebagai sebuah area geografis atas batas wilayah administratif, destinasi pariwisata dapat terdiri lebih dari satu satuan wilayah administratif (UU No.10 Tahun 2009). Wilayah ini disebut sebagai *tourism region* (Gunn & Var,

2002)²⁰. Sistem perwilayahan pariwisata regional tersebut terbentuk oleh pola perjalanan wisatawan (Lue, 1992)²¹. Gambar 6 memberikan gambaran tentang sistem perwilayahan tersebut.

Gambar 6. Sistem Perwilayahan



AP: Asal Pengunjung; K: Kota; D: Desa

Sumber: Lue, 1992.

Penjelasan gambar di atas adalah sebagaimana berikut:

- Wisatawan datang dari destinasi asal menuju kota utama di wilayah pariwisata;
- Dari kota utama wisatawan memiliki alternatif:
 - Tetap tinggal di kota dan menghabiskan waktu libur sepenuhnya di kota;
 - Tetap tinggal di kota namun berkunjung ke satu atau beberapa desa sebagai pelancong (*base camp*);
 - Kota sebagai area transit dan menuju ke desa untuk tinggal di desa; dan
 - Dapat tetap tinggal di 1 (satu) desa atau melakukan perjalanan ke beberapa desa tetangga (*regional tour*).

¹⁹ Jenis usaha pariwisata diatur dalam UU No.10 Tahun 2009.

²⁰ Gunn, C.A. & Var, T. (2002). *Tourism Planning: Basics, Concepts, Cases*, edisi keempat. New York: Routledge.

²¹ Lue, C.C. et al. (1993). Conceptualization of Multi-Destination Pleasure Trips. *Annals of Tourism Research*, 20(2), hal. 289-301. Dikutip salah satu pola dari 5 (lima)

alternatif pola perjalanan Dengan penyesuaian sesuai pengamatan di lapangan.

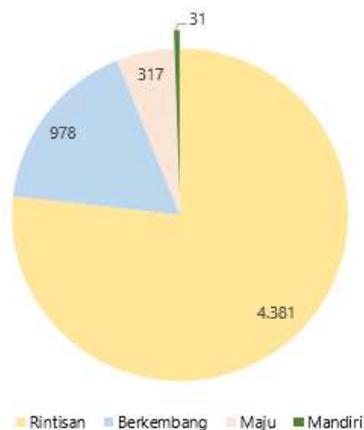
II.2. PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN DESA WISATA.

1. Penilaian Desa Wisata

Penilaian status Desa Wisata Nusantara oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi didasarkan atas basis ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi. Berbeda dengan hal tersebut, penilaian status desa wisata oleh Kemenkomarves (2021)²² yang digunakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ditetapkan atas dasar indikator-indikator jumlah kunjungan, industri pariwisata yang berkembang, kesiapan *skill* dan SDM, diversifikasi produk dan aktivitas wisata, dan amenities pariwisata.

Tahun 2023 tercatat jumlah desa/kampung wisata Indonesia sebanyak 5.673 desa wisata meningkat dari tahun 2014 sebanyak 1.734 desa wisata (Untung, 2018)²³. Gambar 7 menunjukkan proporsi status desa wisata tahun 2024 (Jadesta, 2024)²⁴.

Gambar 7. Status Desa Wisata Tahun 2023.



Sumber: Jadesta, 2024.

Dalam pertimbangan lebih lanjut disarankan sebaiknya penetapan status desa wisata dapat disesuaikan dalam satu kriteria yang sama. Saran ini dapat memberikan beberapa manfaat, yaitu:

- Adanya kesamaan pengertian yang sama atas istilah desa mandiri sebagaimana ditetapkan dalam UU No.6 Tahun 2014. Program sektoral diarahkan untuk mendukung tujuan bersama tersebut.
- Adanya kesamaan data antar kementerian;
- Adanya kesepakatan dukungan kegiatan antar sektor menyangkut pencapaian tujuan yang sama;
- Desa tidak terbebani oleh berbagai program sektoral yang sering tumpang tindih;
- Kinerja desa wisata dapat lebih diukur dalam satu kesepakatan yang sama, siapa pun sektor pelaksanaannya; dan
- Membangun pariwisata dapat sekaligus memanfaatkan kesiapan infrastruktur yang disiapkan melalui program pembangunan desa mandiri.

2. Pergeseran Paradigma Desa Wisata

Pembangunan pariwisata mengalami pergeseran paradigma dari pertumbuhan ke pelestarian. Pergeseran paradigma ini disikapi dengan melakukan pergeseran arah pembangunan pariwisata di desa.

Awalnya indikator pembangunan desa wisata lebih mengarah pada pertumbuhan (Kemenkomarves, 2021)²⁵. Pada tahap berikutnya pedoman pengembangan desa wisata diarahkan pada konsep pembangunan desa wisata berkelanjutan dalam konsep desa wisata hijau (GIZ & BAPPENAS, 2017)²⁶.

²² Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi (2021). *Pedoman Desa Wisata*, edisi kedua. Jakarta: Kemenkomarves.

²³ Untung (2018). Data BPS: Indonesia Punya 1.734 Desa Wisata. Dikutip dari <https://infopublik.id/kategori/ekonomi-bisnis/316981/data-bps-indonesia-punya-1-734-desa-wisata>

²⁴ Dikutip dari <https://jadesta.kemenparekraf.go.id/sebaran>.

²⁵ Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi (2021). *Pedoman Desa Wisata*, edisi kedua. Jakarta: Kemenkomarves.

²⁶ GIZ & BAPPENAS (2017). *Buku Panduan Pengembangan Desa Wisata Hijau*. Jakarta: Kementerian Koperasi dan UMKM.

Pandemi Covid-19 yang dimulai pada tahun 2020 telah memberi pelajaran baru bagi pembangunan desa wisata. Akibat tidak terjadinya kunjungan maka hal yang menyelamatkan kehidupan desa justru terkait dengan komitmen mereka atas mata pencaharian pokok terutama di sektor pertanian (Raharjana & Ansori, 2020)²⁷.

Atas dasar hal tersebut maka saat ini disadari bahwa pembangunan desa wisata tidak cukup disikapi dengan konsep pertumbuhan (*growth*) dan keberlanjutan (*sustainability*) namun keberlanjutan dan ketahanan (*sustainability and resiliency*). Kebijakan pembangunan desa wisata berbasis ketahanan ini merupakan pula amanat UU No.6 Tahun 2014 dalam membangun desa mandiri.

Di sini terjadi pergeseran pola pemikiran pembangunan pariwisata dari bentuk dari Desa Wisata 1.0, Desa Wisata 2.0, menuju Desa Wisata 3.0. Masa depan dengan perkembangan teknologi baru maka paradigma pembangunan desa wisata akan mengarah pada Desa Wisata 4.0, desa wisata siber²⁸. Proses pergeseran paradigma pembangunan desa wisata dapat dilihat pada Gambar 8 berikut.



Gambar 8. Pergeseran Paradigma Pembangunan Desa Wisata.

²⁷ Raharjana, D.T. & Al Anshori, H.A. (2020). *Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Desa/Kampung Wisata di Indonesia*. Yogyakarta: Desa Wisata Institut.

²⁸ Saat ini belum terjadi namun di masa depan dimungkinkan terwujud dengan berkembangnya Revolusi industri 4.0.

III. PEMBANGUNAN DESA WISATA BERKETAHANAN



III.1. KONSEP PEMBANGUNAN DESA WISATA BERKETAHANAN

1. Konsep Dasar Pembangunan Desa Wisata Berketahanan

Perhatian pada konsep pariwisata berketahanan (*resilient tourism*) tumbuh terkait dengan upaya untuk memberikan respons terhadap bencana alam termasuk nonalam seperti pandemi Covid-19 (UNESCO, 2020²⁹; The World Bank, 2020³⁰). Pandemi Covid-19 menyadarkan para pelaku pariwisata di desa wisata bahwa ketahanan desa, sebagaimana amanat UU No.6 Tahun 2014, merupakan hal terpenting bagi keberlanjutan kehidupan desa.

Kesadaran lain adalah bahwa pertumbuhan pariwisata harus dilakukan bersamaan dengan menjaga nilai kehidupan sosial dan ekonomi lokal

dan bukan dengan mengorbankan kehidupan sosial ekonomi lokal (*growth and sustainability*). Konsep tersebut kemudian dijadikan ukuran daya saing sebuah destinasi pariwisata sebagaimana diinisiasi oleh WEF (2022)³¹.

Ketahanan desa bukan merupakan konsep baru yang menggantikan pembangunan desa wisata berkelanjutan namun menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan melengkapi konsep desa wisata berkelanjutan (*beyond sustainability*). Konsep Desa Wisata 3.0 merupakan pengembangan dari konsep-konsep sebelumnya sesuai dengan perubahan dan permintaan baru. Ada 3 (tiga) hal penting yang mendorong diperhatikannya konsep Desa Wisata Berketahanan, yaitu:

- a. Terjadinya berbagai bencana yang merusak kehidupan desa telah mendorong perlunya perhatian pada persiapan atas risiko bencana (The World Bank, 2020³²);
- b. Pandemi Covid-19³³ menyadarkan desa bahwa desa harus menyiapkan diri untuk hal terburuk dalam kehidupannya yang dapat mengganggu kehidupan sosial, ekonomi, dan ekologis; dan
- c. Di samping bencana alam dan nonalam, berkembangnya pariwisata juga berpotensi dapat memberikan kerusakan sosial dan ekonomi lokal.

²⁹ UNESCO (2020). *Sustainable and Resilient Tourism*. Dikutip dari https://en.unesco.org/sites/default/files/info_sheet_sustainable_tourism.pdf

³⁰ The World Bank (2020). *Resilient Tourism. Competitiveness in the Face of Disasters*. Washington D.C.: The World Bank.

³¹ WEF (World Economic Forum) (2022). *Travel & Tourism Development Index 2021. Rebuilding for a Sustainable and Resilient Future*. Geneva: WEF.

³² The World Bank (2020). *Resilient Tourism. Competitiveness in the Face of Disasters*. Washington D.C.: The World Bank.

³³ Pandemi Covid-19 memberikan kondisi nyata bahwa ketahanan desa sangat ditentukan oleh tetap bertahannya ekonomi masyarakat desa pada pekerjaan pokok mereka terutama di bidang pertanian ketika tidak terjadi kunjungan wisatawan. Bahkan banyak pelaku usaha pariwisata yang kemudian beralih pada pekerjaan nonpariwisata di saat pandemi Covid-19 tersebut.

2. Perbedaan antar Konsep Desa Wisata

Tujuan akhir yang ingin dicapai dalam konsep pembangunan Desa Wisata Berketahanan adalah mewujudkan desa mandiri melalui pariwisata. Di sini pariwisata bukan lagi dianggap sebagai tujuan pembangunan namun sarana untuk memperkuat ketahanan desa dalam hal ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi desa secara berkelanjutan (UU No.6 Tahun 2014³⁴; Permen Desa, PDT, dan Transmigrasi, 2016³⁵). Arahan yang digunakan dalam kebijakannya adalah:

- Ketahanan sosial diwujudkan dalam bentuk pelestarian budaya dan kearifan lokal;
- Ketahanan ekonomi diwujudkan dalam bentuk memberikan hak istimewa bagi masyarakat lokal dalam berusaha; dan
- Ketahanan ekologi diwujudkan dalam bentuk pelestarian lingkungan untuk tujuan pembangunan jangka panjang.

Beberapa perubahan mendasar yang ada dalam konsep Desa Wisata Berketahanan (DW 3.0) di

banding konsep-konsep pembangunan desa wisata sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 3 berikut.

Konsep Desa Wisata Berketahanan tidak mengubah konsep pembangunan desa wisata sebelumnya, yaitu desa wisata berkelanjutan (desa wisata hijau namun mengembangkan sesuai dengan kondisi yang berkembang. Tabel 1 berikut menjelaskan sandingan kebijakan antar konsep Desa Wisata 1.0, Desa Wisata 2.0, dan Desa Wisata 3.0.

Tabel 1 menjelaskan bahwa konsep Desa Wisata Berkelanjutan tidak mengarah pada konsep pertumbuhan namun melengkapi konsep pembangunan desa wisata berkelanjutan. Pertumbuhan kunjungan penting namun lebih diutamakan kemanfaatan bagi desa wisata dalam jangka panjang. Konsep ini merupakan konsep pembangunan pariwisata *beyond sustainability*.

Tabel 1. Perbedaan Konsep Pembangunan Desa Wisata.

Pendekatan	Penjelasan	DW 1.0	DW 2.0	DW 3.0
Manajemen kepariwisataan	Memperkuat lembaga dan fungsi tata kelola serta koordinasi antar pelaku		+	+
Fungsi manajemen	Memperkuat kualitas sumber daya manusia dan sumber dana organisasi			+
Pembangunan berkelanjutan	Harmonisasi pembangunan lingkungan, sosial, dan ekonomi		+	+
Pelestarian pusaka	Pelestarian pusaka alam, budaya, dan saujana		+	+
Ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi	Mempertahankan kehidupan berbasis ekonomi tradisional dan budaya lokal			+
Penciptaan lapangan kerja	Penciptaan lapangan kerja baru bagi masyarakat dan peningkatan pendapatan		+	+
Membangun kemitraan	Membangun kemitraan antar usaha		+	+
Pemberdayaan komunitas	Memperkuat peran komunitas sebagai pelaku utama pembangunan		+	+

³⁴ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Desa*.

³⁵ Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi No. 2 Tahun 2016 tentang *Indeks Pembangunan Desa*.

Pemahaman atas peran sektor pariwisata	Pariwisata sebagai sarana menuju kesejahteraan dan bukan tujuan pembangunan	+	+
Manajemen kunjungan	Mengelola kunjungan sesuai dengan kapasitas daya dukung desa		+
Tanggung jawab pengunjung	Pengunjung menjadi bagian dari pelestarian dan perbaikan lingkungan (regeneratif) baik langsung maupun tidak langsung		+
Menyiapkan paket wisata berbasis pada produk lokal	Memperkuat rantai nilai produk lokal dan mengurangi kebocoran ekonomi	+	+
Strategi pemasaran	Paket disusun tidak hanya atas dasar permintaan pasar namun juga kemanfaatan bagi masyarakat lokal		+
Memperkuat posisi masyarakat dalam pembangunan	Masyarakat memiliki hak utama (<i>privilege</i>) atas kegiatan usaha di desa		+
Inklusivitas	Menetapkan secara eksplisit unsur kesetaraan gender dan disabilitas		+
Keseimbangan perhatian pada pengunjung dan masyarakat lokal	Keseimbangan memenuhi kepuasan pengunjung dan kepuasan komunitas	+	+
Perkuatan teknologi industri 3.0	Pemanfaatan teknologi untuk pengayaan produk dan pemasaran		+

IV. PENILAIAN DESA WISATA BERKETAHANAN



IV.I. KONSEP PENILAIAN

1. Tujuan Penilaian Mandiri

Secara nasional penilaian desa berketahanan dilakukan dengan menggunakan pedoman Peraturan Menteri Pariwisata No. 9 Tahun 2021³⁶ dan mengacu pada pedoman GSTC (2019)³⁷. Peraturan tersebut menetapkan 4 (empat) kriteria penilaian berupa kelembagaan, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pilar-pilar dalam Peraturan Menteri Pariwisata No. 9 Tahun 2021 tersebut dijabarkan ke dalam 38 sub kriteria, dan 174 indikator³⁸.

Penilaian secara komprehensif dilakukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dalam praktek kompleksitas penilaian atas dasar pedoman tersebut menyebabkan sulitnya desa wisata melakukan pengisian atas permintaan data yang diperlukan. Satu dan lain hal adalah disebabkan oleh keterbatasan data dan informasi

yang ada di desa. Sebagai catatan, hasil penilaian yang dicapai sampai saat ini adalah tersertifikasinya sebanyak 16 desa wisata di tahun 2021 dan 4 desa wisata di tahun 2022.

Untuk mengisi kekosongan yang ada terkait dengan banyaknya jumlah desa wisata (5.673 desa wisata) ((Jadesta, 2024)³⁹, maka desa wisata perlu didorong untuk dapat melakukan penilaian mandiri terkait dengan konsep keberlanjutan dan ketahanan dengan tujuan:

- a. Memperkuat peran komunitas dalam memahami dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi secara cepat dan tepat;
- b. Memudahkan peran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam memantau kinerja desa wisata; dan
- c. Memudahkan pilihan atas program pengembangan secara lebih lebih spesifik untuk menangani permasalahan yang ada di tiap desa wisata sejak awal bimbingan dan pelatihan sampai dengan rencana kegiatan.

Catatan di atas akan mengubah pendekatan perencanaan yang dilakukan dari semula pada pendekatan *top-down* ke arah *bottom-up*. Sudah saatnya komunitas perlu diperkuat untuk dapat menyelesaikan persoalan dirinya sendiri mengacu pada pedoman yang seharusnya dilakukan.

2. Persoalan yang Dihadapi

Saat ini penilaian atas desa wisata berkelanjutan dilakukan di tingkat nasional sesuai dengan pedoman yang diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 9 Tahun 2021. Beberapa persoalan yang dihadapi adalah:

³⁶ Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 9 Tahun 2021 tentang *Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan*.

³⁷ GSTC (2019). *GSTC Destination Criteria. Performance Indicators and SDGs*.

³⁸ Penilaian Desa Wisata Berkelanjutan sebagaimana format yang di isi oleh Desa Wisata Bilebante.

³⁹ Di kutip dari <https://jadesta.kememparekraf.go.id/sebaran>.

- a. Kemampuan penilaian desa wisata berkelanjutan. Penilaian oleh Kementerian Pariwisata selama tahun 2021 dan 2022 baru menghasilkan 20 desa wisata bersertifikat berkelanjutan. Angka tersebut masih jauh dari total jumlah desa wisata yang tercatat sebanyak 5.673 desa wisata di tahun 2023 (Jadesta, 2024)⁴⁰. Untuk itu diperlukan terobosan kebijakan guna mempercepat penilaian tersebut;
- b. Jumlah indikator keberlanjutan yang digunakan dalam pedoman di atas sebanyak 174 indikator. Hal ini menyulitkan pengisian di tingkat desa wisata sehubungan dengan terbatasnya data dan informasi yang diperlukan untuk pengisiannya;
- c. Pembangunan pariwisata saat ini mengarah pada prinsip berkelanjutan dan ketahanan. Untuk itu diperlukan penyesuaian indikator terkait dengannya; dan
- d. Belum ada model penilaian mandiri yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja desa wisata setiap saat. Hasil evaluasi tersebut dapat segera digunakan untuk mengatasi persoalan tanpa menunggu evaluasi dalam skala yang lebih luas. Model ini juga mengarah pada prinsip perkuatan peran masyarakat dalam pembangunan.

- b. Mengolaborasikan konten penilaian antara Kementerian karena tujuan akhir yang sama, yaitu desa mandiri berketahanan;
- c. Memberikan pengayaan pada elemen-elemen kriteria dan indikator terkait dengan pentingnya unsur ketahanan.

Perubahan dilakukan terkait dengan tujuan penilaian mandiri yang memerlukan alat penilaian yang lebih sederhana. Perubahan utama terletak pada pengurangan jumlah indikator menyesuaikan diri dengan ketersediaan data dan informasi di desa tanpa mengurangi esensi tujuan pembangunan berkelanjutan. Tabel 2 berikut menunjukkan perbandingan konten penilaian antar pedoman.

Tabel 2. Perbandingan Konten Penilaian Antar Pedoman.

Elemen dasar ⁴¹	Permen Parekraf	Desa Wisata 3.0
Kriteria/pilar	4	4
Sub kriteria/kriteria	38	14
Indikator	174	46

Alat penilaian disiapkan secara lebih sederhana namun tetap mengacu pada konten pedoman penilaian desa wisata berkelanjutan yang ada. Model penilaian yang disiapkan dapat dilihat pada Gambar 9 berikut.

IV.2. ELEMEN PENILAIAN

1. Struktur penilaian

Pilar utama penilaian Desa Wisata Berkelanjutan disesuaikan dengan elemen penilaian dengan Peraturan Menteri Pariwisata No. 9 Tahun 2021 serta Permen Desa, PDT, dan Transmigrasi, 2016. Penyesuaian tersebut dimaksudkan agar:

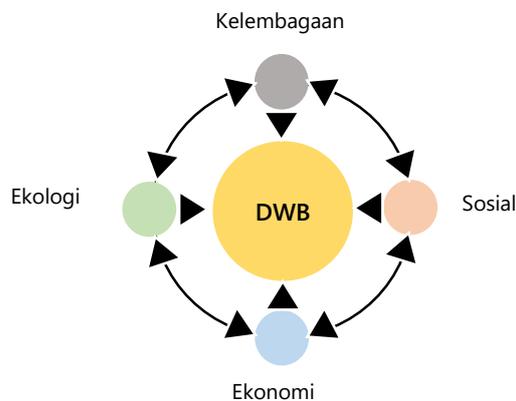
- a. Menjelaskan bahwa metode penilaian tidak berbeda dengan pedoman yang telah ada, yang telah akrab dengan penggunanya;

⁴⁰ Dikutip dari <https://jadesta.kemenparekraf.go.id/sebaran>.

⁴¹ PermenParekraf menggunakan istilah kriteria, sub kriteria, dan indikator. Desa Wisata Berkelanjutan menggunakan

istilah pilar, kriteria, dan indikator mengacu pada penilaian desa mandiri.

Gambar 9. Elemen Penilaian Desa Wisata Berketahanan.



DWB= Desa Wisata Berketahanan.

Penjelasan gambar di atas adalah sebagaimana berikut.

- a. Desa Wisata 3.0 merepresentasikan bentuk desa wisata mandiri yang didukung oleh pilar-pilar ketahanan kelembagaan, sosial, ekonomi, dan ekologi;
- b. Masing-masing pilar saling berinteraksi dan bersinergi mendukung terwujudnya desa wisata mandiri dan berketahanan.

2. Pilar Utama

Penilaian Desa Wisata Berketahanan terdiri atas 4 (pilar) yaitu pilar kelembagaan, pilar sosial, pilar ekonomi, dan pilar ekologi. Penjelasan masing-masing pilar adalah:

- a. Pilar kelembagaan merupakan unsur utama keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan Desa Wisata Berketahanan. Pilar kelembagaan didukung oleh adanya lembaga komunitas⁴² yang efektif dalam membangun koordinasi internal dan eksternal antar pelaku pembangunan;
- b. Pilar ketahanan sosial menjelaskan bahwa pembangunan Desa Wisata Berketahanan bertumpu pada kekuatan otentisitas dan jati diri desa berupa karakteristik, tradisi, budaya,

dan kearifan lokal untuk tujuan pembangunan manusia seutuhnya;

- c. Pilar ketahanan ekonomi mengacu pada pelestarian ekonomi tradisional berdasar pada adat istiadat, sejarah, dan kepercayaan turun-temurun. Sistem ekonomi tradisional identik dengan sistem ekonomi yang diterapkan di masyarakat pedesaan yang tidak dapat dipisahkan secara tegas dengan sistem budaya yang ada, misalnya tradisi merayakan pesta panen di berbagai daerah; dan
- d. Pilar ketahanan ekologi menjaga hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya untuk tujuan keberlanjutan pembangunan. Kearifan lokal (*local wisdom*) di desa sangat terkait erat dengan bentuk ketahanan ekologi ini, misalnya konsep *Tri Hita Karana* di Bali dan *Memayu Hayuning Bawana* di Jawa yang menunjukkan kepedulian pada hubungan antara manusia dengan Tuhan, antar manusia, dan manusia dengan segenap isi alam baik flora maupun faunanya. Ketahanan ekologi juga termasuk antisipasi pada terjadinya bencana baik alam, nonalam, sosial, ekonomi, serta bencana akibat kegiatan wisatawan⁴³.

3. Kriteria dan Indikator

Masing-masing pilar penilaian dibagi atas kriteria dan indikator sebagaimana Tabel 2 dengan penjelasan:

- a. Pilar kelembagaan dijabarkan ke dalam 4 kriteria dan 13 indikator;
- b. Pilar ketahanan sosial dijabarkan ke dalam 3 kriteria dan 12 indikator;
- c. Pilar ketahanan ekonomi dijabarkan ke dalam 3 kriteria dan 11 indikator; dan
- d. Pilar ekologi dijabarkan ke dalam 3 kriteria dan 10 indikator.

⁴² Bentuk lembaga disesuaikan dengan pilihan dan kebutuhan masyarakat lokal. Bentuk lembaga dapat berupa koperasi, BUMDes, ataupun Pokdarwis.

⁴³ Sebagaimana terjadinya kebakaran hutan akibat ulah pengunjung.

Dengan demikian secara keseluruhan kinerja Desa Wisata Berketahanan dinilai atas 4 pilar, total 13 kriteria dan 46 indikator . Jumlah ini mereduksi penilaian terhadap Desa Wisata Berkelanjutan (Peraturan Menteri Pariwisata No. 9 Tahun 2021) yang menilai 4 kriteria, 38 sub kriteria, dan 174 indikator⁴⁴. Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan:

- a. Dengan tujuan penilaian mandiri mandiri (*self assessment*) maka jumlah indikator dibatasi namun tetap memperhatikan tujuan akhir pembangunan berkelanjutan;
- b. Penilaian mandiri bertujuan agar pengelola desa wisata dapat menilai diri sendiri secara jujur karena untuk kepentingan diri sendiri;
- c. Pengurangan jumlah indikator mempertimbangkan ketersediaan data dan informasi, relevansinya pada hal-hal pokok yang dapat diberlakukan secara nasional. Sedangkan aturan lokal dapat dikembangkan sendiri oleh masing-masing desa sesuai

dengan norma dan kearifan desa masing-masing; dan

- d. Penilaian atas dasar ketahanan tidak berpengaruh pada penetapan status desa wisata yang telah ditetapkan dengan kriteria yang ada. Penilaian ketahanan lebih mengarah pada indikator ketahanan desa di setiap status desa wisata yang ada baik itu desa wisata rintisan, berkembang, maju, maupun mandiri.

Penetapan dan perhitungan atas pilar, kriteria, dan indikator diperlukan guna menentukan Indeks pembangunan Desa Wisata Berketahanan. Pembagian pilar, kriteria, dan indikator dapat dilihat pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Pilar, Kriteria, dan Indikator⁴⁵

1. Kelembagaan	
Kriteria	Indikator
1.1. Keberadaan lembaga	1.1.1. Bentuk lembaga pariwisata di desa 1.1.2. Tugas dan fungsi unit kerja 1.1.3. Komitmen pengurus lembaga pariwisata di desa
1.2. Manajemen organisasi	1.2.1. Rencana kerja organisasi 1.2.2. Monitoring dan evaluasi
1.3. Efektivitas organisasi	1.3.1. Ketersediaan sumber dana 1.3.2. Ketersediaan dana dari Pemerintah Desa dalam mendukung kelembagaan pariwisata 1.3.3. Pelaporan kegiatan lembaga pariwisata 1.3.4. Sumber daya manusia 1.3.5. Kemitraan dengan pelaku usaha
1.4. Manajemen kepariwisataan	1.4.1. Tersedianya rencana induk kepariwisataan desa 1.4.2. Manajemen destinasi pariwisata 1.4.3. Manajemen pengunjung
2. Sosial	
Kriteria	Indikator
2.1. Pelestarian budaya tak benda	2.1.1. Even tradisi festival

⁴⁴ Penilaian Desa Wisata Berkelanjutan sebagaimana format yang di isi oleh Desa Wisata Bilebante.

⁴⁵ Mengacu (dengan penyesuaian) pada kriteria dan indikator sebagaimana pedoman GSTC (2019). GSTC

Destination Criteria. Performance Indicators and SDGs dan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang *Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan*.

	<ul style="list-style-type: none"> 2.1.2. Sanggar budaya tradisional 2.1.3. Perlindungan terhadap kekayaan lokal 2.1.4. Sanksi bagi pelanggaran norma budaya dan kearifan lokal 2.1.5. Interpretasi budaya 2.1.6. Dukungan penyelenggaraan even budaya
2.2. Pelestarian cagar budaya	<ul style="list-style-type: none"> 2.2.1. Inventarisasi cagar budaya 2.2.2. Peraturan pengendalian perlindungan cagar budaya
2.3. Daya dukung sosial	<ul style="list-style-type: none"> 2.3.1. Dampak sosial pembangunan pariwisata 2.3.2. Tingkat kriminalitas 2.3.3. Tingkat pelanggaran norma lokal 2.3.4. Interaksi antara pengunjung dengan tuan rumah
3. Ekonomi	
Kriteria	Indikator
3.1. Menjaga ekonomi tradisional	<ul style="list-style-type: none"> 2.1.1. Menjaga ekonomi tradisional 2.1.2. Pemanfaatan produk lokal dalam mendukung usaha pariwisata 2.1.3. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi dalam promosi produk lokal
3.2. Dampak terhadap ekonomi lokal	<ul style="list-style-type: none"> 2.1.4. Penciptaan lapangan kerja langsung dan tidak langsung 2.1.5. Peningkatan pendapatan masyarakat 2.1.6. Eksistensi UMKM pariwisata
3.3. Perlindungan terhadap usaha dan tenaga kerja lokal	<ul style="list-style-type: none"> 3.3.1. Akses tenaga kerja lokal dalam usaha pariwisata 3.3.2. Pelatihan bagi SDM lokal untuk dapat memasuki pasar kerja pariwisata 3.3.3. Kesetaraan gender dan disabilitas 3.3.4. Perlindungan kepemilikan usaha bagi warga lokal (<i>privilege</i>) 3.3.5. Keluhan masyarakat atas adanya kompetisi usaha yang tidak sehat
4. Ekologi	
Kriteria	Indikator
4.1. Pelestarian alam dan saujana (<i>cultural landscape</i>)	<ul style="list-style-type: none"> 4.1.1. Zonasi untuk perlindungan sumber daya desa 4.1.2. Pengawasan pembangunan fasilitas pariwisata 4.1.3. Kegiatan pemulihan kerusakan oleh pengunjung
4.2. Kapasitas daya dukung lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> 4.2.1. Keluhan masyarakat terhadap kerusakan alam 4.2.2. Pedoman penetapan kegiatan agar tidak melampaui batas ambang kapasitas daya dukung lingkungan
4.3. Manajemen risiko	<ul style="list-style-type: none"> 4.3.1. Kesiapan menghadapi risiko bencana alam, non alam, sosial, termasuk aktivitas pengunjung 4.3.2. Kualitas udara 4.3.3. Penanganan sampah 4.3.4. Kualitas air 4.3.5. Polusi visual

V. METODE PENILAIAN DAN TAHAPAN PELAKSANAAN



V.1. METODE PENILAIAN

1. Penilaian Indeks Ketahanan

Penilaian indeks dari masing-masing indikator dan kriteria merupakan masukan penting karena dapat berpengaruh pada nilai akhir indeks pembangunan Desa Wisata Berkelanjutan. Untuk itu metode perhitungan disiapkan agar setiap pihak terkait dapat memahami cara perhitungan yang dilakukan.

Tahapan perhitungan indeks pembangunan Desa Wisata Berketahanan adalah sebagaimana berikut⁴⁶:

- Setiap indikator memiliki nilai antara 1 sampai 5 dengan ketentuan semakin tinggi nilai yang diberikan akan semakin baik kualitas kinerja indikator yang bersangkutan⁴⁷;
- Hasil dari nilai yang didapat kemudian dikelompokkan dalam skor kriteria dan menghasilkan indeks kriteria yang

dirumuskan dari perhitungan nilai skor indikator menjadi indeks dengan nilai 0 sampai 1 dengan cara:

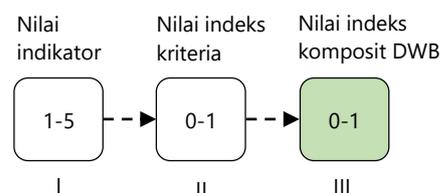
$$\text{Indeks kriteria} = \frac{\text{Total skor indikator}}{\text{Nilai maksimum indikator}}$$

Indeks Desa Wisata Berketahanan merupakan indeks komposit yang dihasilkan dari rata-rata nilai indeks ketahanan, yaitu:

$$\text{Indeks Desa Wisata Berketahanan} = \frac{1}{4} (\text{Indeks lembaga} + \text{indeks sosial} + \text{indeks ekonomi} + \text{indeks ekologi})$$

Petunjuk tahapan penilaian untuk mendapatkan indeks komposit Desa Wisata berketahanan tersebut adalah sebagaimana Gambar 10 berikut.

Gambar 10. Tahapan Penilaian.



Penjelasannya gambar di atas adalah:

- Tahap I berupa nilai dasar yang diisi secara mandiri oleh pengelola Desa Wisata Mandiri. Nilai diisi atas dasar daftar pertanyaan yang disiapkan dalam bentuk form isian (form *google* terlampir). Nilai diisi dari angka 1 (terendah) sampai 5 (tertinggi);
- Tahap II mengonversikan nilai skor indikator ke dalam indeks kriteria dengan rumus

⁴⁶ Menyesuaikan dengan metode penilaian desa sebagaimana Permen Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016.

⁴⁷ Menyesuaikan dengan metode bintang pada google survei sehingga penilaian melalui sistem digital dapat lebih mudah dikoneksikan.

seperti di atas yaitu total skor dibagi dengan nilai maksimum kriteria; dan

- c. Tahap III nilai indeks Desa Wisata Mandiri didapat dari total nilai kriteria dibagi 4 (empat). Angka 4 (empat adalah jumlah pilar.

2. Uji Penilaian

Uji penilaian awal dilakukan oleh Tim Bappenas untuk tujuan menilai bekerjanya metode penghitungan yang ada. Saat itu dilakukan sampling pada 24 desa melalui kuesioner *online* dalam bentuk *google form* (terlampir). Desa sampling dipilih secara acak dari status rintisan, berkembang, maju, dan mandiri untuk dapat menilai korelasi antara status dengan ketahanan desa wisata. Hasil yang didapat berupa:

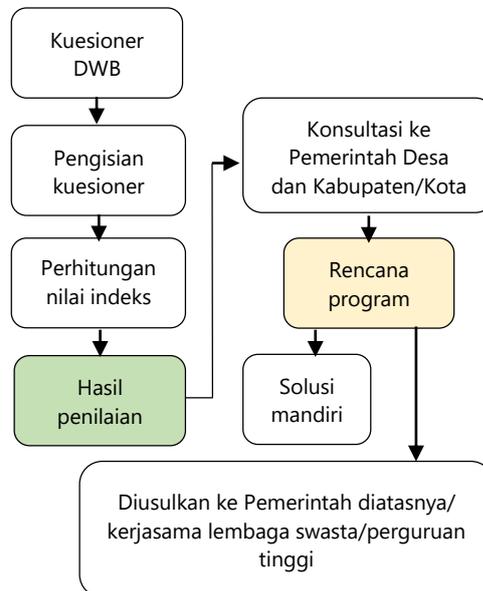
- a. Nilai total desa wisata sampling menunjukkan bahwa tidak ada korelasi positif antara status desa dengan nilai ketahanan desa. Temuan menunjukkan bahwa status maju dapat memiliki nilai total lebih tinggi daripada desa wisata mandiri;
- b. Kemungkinan tersebut terjadi karena nilai total merupakan representasi dari masing-masing nilai indikator. Temuan juga menunjukkan bahwa walaupun dengan status desa mandiri namun ada salah satu nilai indikator yang masih kurang memuaskan ; dan
- c. Potret tersebut dapat memperlihatkan sisi kelemahan atau kekuatan indikator yang berguna bagi bahan evaluasi dan perbaikan mandiri. Hasil ini dapat lebih mengarahkan program pembangunan fokus pada elemen-elemen ketahanan yang belum maksimal.

3. Tahapan Penilaian Mandiri

Penilaian mandiri tidak hanya berhenti pada status "cukup mengetahui permasalahan" namun juga sampai pada "menetapkan program aksi sesuai dengan potret permasalahan yang

ditemui". Gambar 11 menjelaskan proses penilaian mandiri tersebut.

Gambar 11. Alur Kerja Penilaian.



Tahapan penilaian sebagaimana gambar di atas adalah:

- a. Kuesioner Desa Wisata Berkelanjutan dapat menggunakan contoh sebagaimana lampiran buku ini;
- b. Pengelola desa wisata melakukan pengisian kuesioner;
- c. Pengelola desa wisata melakukan perhitungan atas informasi yang telah didapat dari pengisian kuesioner dengan hasil penilaian berupa indeks kriteria dan indeks komposit ketahanan;
- d. Hasil tersebut mendasari perencanaan program pembangunan namun terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten atau Kota bila status administrasinya adalah Kampung Wisata; dan
- e. Rencana program, setelah hasil konsultasi, dijabarkan dalam kegiatan program aksi melalui 2 (dua) bentuk, yaitu:
 - Program mandiri dari anggaran dan kegiatan desa baik melalui swadaya maupun dengan memanfaatkan

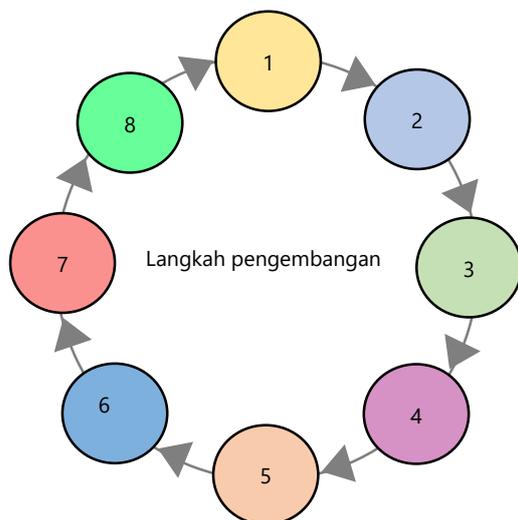
anggaran lain yang ada (misalnya Dana Bantuan Desa);

- Diusulkan ke Pemerintah tingkat di atasnya sesuai dengan kewenangan pemerintahan yang diatur dalam UU No 23 Tahun 2014

V.2. LANGKAH TINDAKAN

Langkah tindakan menuju kesiapan desa wisata sebagai Desa Wisata Berketahanan dilakukan melalui 8 langkah taktis sebagaimana Gambar 12 berikut.

Gambar 12. Langkah Pengembangan⁴⁸.



Langkah-langkah tersebut dijelaskan di bawah ini, yaitu:

1. Melakukan Penilaian Mandiri

Tahap 1 berupa penilaian mandiri terhadap profil ketahanan desa wisata atas dasar kuesioner yang disiapkan. Tahap ini sebetulnya juga merupakan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan yang

telah dilakukan selama ini, khususnya berkenaan dengan ketahanan desa wisata.

Penilaian diperlukan untuk dapat memahami seberapa besar efektivitas kegiatan dikaitkan dengan standar dan harapan. Hasil penilaian digunakan sebagai dasar rencana pembangunan tahap selanjutnya.

Sebagai catatan, penilaian mandiri ini bukan sarana untuk mencari *award* namun sarana untuk mengevaluasi kelebihan dan kekurangan yang ada di desa wisata untuk dapat diperbaiki⁴⁹. Beberapa pedoman evaluasi adalah:

- a. Siapkan diri untuk melakukan penilaian mandiri atas *form* kuesioner yang disediakan;
- b. Komunikasikan pengisian dengan para pelaku terkait agar didapat kesamaan pandang atas persoalan yang dihadapi;
- c. Teliti nilai-nilai indikator yang terlihat belum optimal yang kemudian perlu menjadi prioritas bagi rencana kebijakan ke depan; dan
- d. Total indeks ketahanan dapat menjadi pedoman umum namun yang lebih penting adalah memahami nilai tiap indikator dan memahami apa penyebab didapatnya nilai tersebut.

2. Menyiapkan Arah Kebijakan Program Menuju Ketahanan Desa.

Hasil evaluasi akan menentukan arah kebijakan yang akan diambil. Fokus utama diberikan pada nilai-nilai indikator yang dianggap belum optimal dan penyiapan arah kebijakan dapat dilakukan dengan cara:

- a. Bahas hasil penilaian mandiri dengan para pelaku terkait di tingkat desa dan kabupaten, dan atau pada tingkatan yang lebih tinggi

⁴⁸ Dikembangkan dan disesuaikan dari GIZ (2021). *Panduan Praktis 10 Langkah Mengembangkan Desa Wisata Hijau*. Jakarta: GIZ.

⁴⁹ Hal tersebut sama dengan kegiatan *check up* kesehatan yang digunakan untuk dapat melihat persoalan yang ada dan apa yang harus dilakukan untuk melakukan perbaikan bila terindikasi ada persoalan di kesehatan.

sesuai dengan konteks persoalan yang dihadapi;

- b. Bahasan dapat dilakukan melalui forum FGD (*focus group discussion*) atau *rembug desa* dengan menghadirkan para pihak dari pemerintah, pelaku usaha pariwisata, masyarakat, dan akademisi⁵⁰;
- c. Lakukan kesepakatan arah kebijakan bersama dalam menyikapi persoalan yang ada yang akan dijadikan dasar kebijakan dalam penetapan rencana ke depan; dan
- d. Jadikan kesepakatan tersebut sebagai dasar bagi rencana arah kegiatan lebih lanjut.

3. Memperkuat Kelembagaan

Unsur kelembagaan merupakan faktor penting dalam pembangunan desa wisata. Kelembagaan tidak hanya diukur dengan sudah ada, atau belum adanya, organisasi komunitas lokal di desa namun efektivitas lembaga dalam mengelola pembangunan pariwisata di desa. Beberapa pedoman yang diperlukan adalah:

- a. Bangun kesadaran awal dengan komunitas di desa wisata mengenai pentingnya lembaga komunitas yang dapat mengakomodasikan semua kepentingan masyarakat;
- b. Tetapkan tujuan dibentuknya organisasi dan ini harus dapat disepakati oleh para pihak yang terlibat;
- c. Tetapkan struktur organisasi minimal dan akan dapat disesuaikan kemudian terkait dengan persoalan yang dihadapi;
- d. Siapkan sumber daya pengelola yang diutamakan dari komunitas lokal;
- e. Tetapkan bentuk organisasi sementara yang dapat disempurnakan sambil menyesuaikan dengan kebutuhan secara berkala; dan
- f. Tetapkan organisasi dalam bentuk dokumen formal oleh Kepala Desa dan atau pada tingkatan di atasnya setelah organisasi tersebut dianggap tepat.

4. Menyiapkan Rencana Pembangunan Desa Wisata Berketahanan

Hasil bahasan pada tahap 2 memerlukan tindak lanjut yang lebih terukur melalui penyiapan rencana pembangunan Desa Wisata Berketahanan (RIPPARDES). Penyusunan rencana pembangunan merupakan tahapan penting dalam pembangunan Desa Wisata Berkelanjutan. Beberapa kegiatan yang perlu dilakukan adalah:

- a. Tetapkan standar kinerja yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu (disarankan dalam 3 tahun ke depan untuk kemudahan evaluasi);
- b. Siapkan identifikasi masalah secara lebih rinci pada tiap-tiap indikator yang dinilai;
- c. Siapkan data yang diperlukan sesuai dengan identifikasi masalah agar supaya data yang didapat relevan dengan persoalan yang dihadapi dan ingin diselesaikan;
- d. Cari mitra dari pihak-pihak luar yang memiliki kemampuan (ahli) perencanaan. Disarankan dari perguruan tinggi setempat atau dibantu oleh Kabupaten; dan
- e. Presentasikan rencana tersebut kepada para pemangku kegiatan dalam forum desa untuk mendapatkan saran dan kesepakatan bersama.

5. Membangun Kemitraan

Pembangunan Desa Wisata Berketahanan tidak dapat dilakukan sepenuhnya oleh desa karena kompleksnya permasalahan yang dihadapi. Untuk itu diperlukan kemitraan baik antar desa, antar tingkatan pemerintahan, dan antara masyarakat dengan pelaku industri dalam skala luas. Beberapa pedoman yang perlu dilakukan adalah:

- a. Bangun kerja sama dengan masyarakat dengan cara menjelaskan visi, misi, dan rencana kerja yang akan dilakukan;

⁵⁰ Diwakili oleh perguruan pariwisata terdekat.

- b. Jelaskan manfaat yang akan didapat masyarakat melalui pembangunan pariwisata;
- c. Ajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga hubungan sosial, ekonomi, dan ekologi dengan penjelasan atas manfaat yang didapat;
- d. Bangun kemitraan dengan desa tetangga untuk dapat memperkuat kerja sama karena persoalan ketahanan tidak selalu terbatas atas dasar administrasi desa; dan
- e. Bangun kemitraan lebih luas lintas sektor dan dengan pelaku usaha pariwisata skala regional dan atau nasional.

6. Merancang Paket Wisata

Paket wisata merupakan bentuk komersial dari produk pariwisata yang merupakan kemasan barang, jasa, tampilan karakteristik desa dan kegiatan wisatawan (UNWTO, 2008)⁵¹. Dalam konsep Desa Wisata Berketahanan unsur pendukung tersebut memperhatikan keterkaitan rantai nilai antar usaha, pelestarian, dan ketahanan kehidupan dan penghidupan lokal. Beberapa hal penting yang memerlukan perhatian adalah:

- a. Lakukan inventarisasi ketersediaan daya tarik wisata, fasilitas pariwisata, sarana prasarana, aktivitas masyarakat sehari-hari, serta budaya dan kearifan lokal setempat;
- b. Lakukan inventarisasi atas hal-hal yang dapat mengganggu kehidupan sosial budaya dan ekonomi masyarakat desa terkait dengan norma dan hukum adat yang berlaku;
- c. Rencanakan pola kegiatan pengunjung yang dapat memberikan manfaat langsung pada kehidupan masyarakat bermitra dengan operator perjalanan skala nasional atau regional dengan mempertimbangkan kekuatan rantai nilai antar usaha;

- d. Siapkan paket wisata bermitra dengan operator perjalanan yang dapat memaksimalkan nilai tambah sumber daya lokal dengan tujuan keberlanjutan dan regeneratif sumber daya;
- e. Siapkan diferensiasi produk agar memiliki daya saing tinggi, jangan hanya mereplikasi produk dari desa wisata lain;
- f. Lakukan pembinaan atas kualitas sumber daya manusia terkait, dan kualitas fasilitas pendukung seperti *homestay* dan rumah makan, serta kualitas produk pendukung lainnya seperti industri kreatif dan produk pertanian;
- g. Bersama dengan pihak-pihak yang kompeten, masukkan unsur teknologi dalam rangka kemudahan pelayanan (transaksi) dan pengayaan produk pariwisata; dan
- h. Masukkan unsur *product knowledge* agar penyedia jasa dapat memberikan pengetahuan atas manfaat paket wisata kepada konsumen.

7. Menyusun Strategi Pemasaran

Strategi pemasaran adalah rencana menyeluruh, terpadu, dan menyatu di bidang pemasaran dengan memberikan pedoman tentang kegiatan yang dilakukan dalam mencapai tujuan pengenalan dan penjualan produk pariwisata melalui cara memahami permintaan pasar dan ketersediaan produk pariwisata. Beberapa hal yang perlu dilakukan adalah:

- a. Siapkan tema utama Desa Wisata Berketahanan sesuai dengan potensi utama yang ada;
- b. Siapkan *branding* (dan logo) untuk mengomunikasikan kekuatan dan keunikan desa. *Branding* juga digunakan untuk memperkuat komitmen pada

⁵¹ UNWTO (2008). *International Recommendation for Tourism Statistics 2008*. Madrid: UNWTO.

- pembangunan produk pariwisata dalam konsep berkelanjutan dan berketahanan;
- c. Tetapkan segmen pasar yang sesuai dengan karakteristik produk yang disiapkan. Penetapan segmen pasar dapat dibantu oleh para operator perjalanan atau pramuwisata skala regional dan nasional;
 - c. Perhatikan keseimbangan pilihan antara strategi *market-led* dengan *product-led* melalui analisis pendekatan pasar dan produk. Ketergantungan sepenuhnya pada minat dapat merusak sumber daya yang ada. Sebaliknya ketergantungan sepenuhnya pada produk menyebabkan produk tidak diminati pasar;
 - d. Manfaatkan teknologi digital untuk efektivitas dan efisiensi promosi. Saat ini *Market-led* atau *market driven* menjelaskan bahwa permintaan pasar akan menentukan jenis produk, sedangkan *product-led* atau *market driving* menjelaskan penciptaan produk yang dapat memengaruhi pasar. teknologi digital tidak hanya dapat digunakan untuk tujuan promosi namun juga pengayaan produk dan peningkatan kualitas pelayanan; dan
 - e. Mengembangkan kemitraan untuk memperkuat ekosistem usaha dan promosi antar pelaku dan antar desa. Misalnya membangun kemitraan dengan usaha skala nasional dan atau dengan usaha pariwisata di desa sebelah.

8. Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan

Pemantauan dan evaluasi diperlukan untuk menilai pelaksanaan kegiatan apakah telah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Beberapa hal pokok yang diperlukan adalah:

- a. Lakukan studi dampak yang dihasilkan dari pembangunan pariwisata baik dampak ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Studi dampak dapat dibantu oleh perguruan tinggi terdekat;
- b. Lakukan penilaian atas hasil yang telah didapat dengan tujuan yang diharapkan untuk melihat tepat tidaknya kegiatan yang dilakukan;
- c. Siapkan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan dan disampaikan kepada Kepala Desa dan masyarakat secara terbuka; dan
- d. Susun rencana kegiatan untuk tahap berikutnya atas dasar evaluasi mencakup rencana program kegiatan dan anggaran.

GLOSARI⁵²

Desa	Wilayah administratif dengan kewenangan untuk mengatur dirinya sendiri atas dasar prakarsa masyarakat setempat.
Desa wisata berkembang	Desa yang sudah mulai dikenal dan dikunjungi wisatawan, sarana dan prasarana serta fasilitas pariwisata tersedia, dan sudah mulai tercipta lapangan pekerjaan dan aktivitas ekonomi bagi masyarakat dari sektor pariwisata.
Desa wisata berketahanan	Kemampuan desa untuk menyerap gangguan dan berbagai krisis sambil mempertahankan fungsi-fungsi penting, struktur, dan kualitas hidup warganya.
Desa wisata hijau	Pembangunan desa wisata berbasis pelestarian alam, ekonomi dan sosial masyarakat setempat.
Desa wisata mandiri	Desa di mana masyarakatnya sudah memberikan inovasi dalam pengembangan produk pariwisata, memiliki unit kewirausahaan yang mandiri, sudah menjadi destinasi pariwisata yang dikenal oleh mancanegara dan sudah menerapkan konsep keberlanjutan yang diakui oleh dunia, dan sarana dan prasarana tersedia sudah mengikuti standar internasional minimal ASEAN.
Desa wisata maju	Desa yang sudah menjadi destinasi wisata yang dikenal dan banyak dikunjungi oleh wisatawan, termasuk wisatawan mancanegara; sarana prasarana dan fasilitas pariwisata sudah memadai; masyarakat sudah berkemampuan untuk mengelola usaha pariwisata guna peningkatan ekonomi masyarakat di desa dan pendapatan asli desa
Garis kemiskinan	Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan NonMakanan (GKNM).
Kemiskinan	Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.
Kepariwisataan	Sistem pembangunan untuk memperkuat sistem pariwisata.
Ketahanan	Keadaan yang kuat dan tangguh dalam menghadapi segala situasi dan kondisi apapun
Komunitas yang kompeten	Komunitas yang terlibat penuh dalam pembangunan dan pendayagunaan sumber daya untuk mampu mengatasi permasalahan yang dihadapinya secara mandiri
Manajemen	Proses pengorganisasian, pengaturan, pengelolaan SDM, dan pengendalian untuk mencapai tujuan organisasi.
Manajemen destinasi	Manajemen yang dilakukan di destinasi pariwisata guna mengolaborasi kegiatan pembangunan sektoral, menciptakan produk pariwisata yang baik, promosi yang tepat, dan pembuatan aturan yang kondusif
Manajemen krisis	Mengelola krisis akibat bencana alam, nonalam, sosial yang dilakukan melalui tahap kesiap siagaan, darurat, pemulihan, dan normalisasi.

⁵² Dikutip dari berbagai sumber.

Paradigma	Asumsi, konsep, nilai, dan praktek yang diterapkan dalam memandang sebuah realitas dan memengaruhi cara berpikir dan bertindak
Pariwisata	Kegiatan rekreasi yang dilakukan di luar asal wisatawan dengan memanfaatkan fasilitas yang tersedia di destinasi pariwisata yang bersangkutan.
Pariwisata berkelanjutan	Pembangunan yang memberikan perhatian pada dampak pembangunan pariwisata dalam kehidupan lingkungan alam, ekonomi dan sosial untuk masa kini dan masa depan dengan tetap memperhatikan kebutuhan pengunjung, industri, dan masyarakat.
Pelestarian	Upaya dinamis untuk menjaga benda pusaka (<i>heritage</i>) dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
Pelaku perjalanan (<i>traveler</i>)	Seseorang yang melakukan perjalanan di luar tinggal asal untuk berbagai kegiatan apapun baik untuk tujuan rekreasi ataupun nonrekreasi
Pelancong (<i>excursionist</i> atau <i>sameday traveler</i>)	Seseorang yang melakukan perjalanan di luar asal untuk tujuan rekreasi namun tidak tinggal di destinasi yang dikunjungi.
Pembangunan berbasis pada komunitas	Meletakkan peran komunitas lokal sebagai penentu arah pembangunan pariwisata sejak dari proses perencanaan, bukan sebagai obyek pembangunan.
Penduduk miskin	Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.
Pengunjung (<i>visitor</i>)	Seseorang yang melakukan perjalanan di luar asal untuk tujuan rekreasi.
Saujana	Gabungan bentang alam dan budaya dalam kesatuan ruang dan waktu (<i>cultural landscape</i>).
Sustainable Development Goals 2030	Merupakan kesepakatan global untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi bumi dan menciptakan kedamaian dan kemakmuran penduduk dunia
Urbanisasi	Dapat diartikan sebagai perpindahan penduduk dari desa ke kota, atau perubahan sifat dari perdesaan ke perkotaan.
Wisatawan (<i>tourist</i>)	Seseorang yang melakukan perjalanan di luar asal untuk tujuan rekreasi dan tinggal di destinasi yang dikunjungi minimal 24 jam dan maksimal setahun.

REFERENSI

- BPS (2023a). *Persentase Penduduk Daerah Perkotaan menurut Provinsi, 2010-2035*. Dikutip dari bps.go.id.
- BPS (2023b). Berita Resmi Statistik No.47/07/Th.XXVI. 17 Juli 2023.
- GIZ & BAPPENAS (nd). *Buku Panduan Pengembangan Desa Wisata Hijau*. Jakarta: Kementerian Koperasi dan UMKM.
- GSTC (Global Sustainable Tourism Council)(2019). *GSTC Destination Criteria. Performance Indicators and SDGs*.
- Gunn, C.A. & Var, T. (2002). *Tourism Planning: Basics, Concepts. Cases*, edisi keempat. New York: Routledge.
- Jadesta (2023). <https://jadesta.kemenparekraf.go.id/desa/kategori/71>.
- KBBI (2023). *Urbanisasi*. <https://kbbi.web.id/urbanisasi>.
- Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi (2021). *Pedoman Desa Wisata*, edisi kedua. Jakarta: Kemenko Marinvest.
- Kurniawati (2017). *Analisis Faktor Penyebab Kemiskinan Di Desa Kembang Ayun Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah*. Program Studi Ekonomi Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- Lue, C.C. et al. (1993). Conceptualization of Multi-Destination Pleasure Trips. *Annals of Tourism Research*, 20(2), hal. 289-301, dalam Gunn, C.A. & Var, T. (2002). *Tourism Planning: Basics, Concepts. Cases*, edisi keempat. New York: Routledge.
- Noor, A.F. (2003). Alih Fungsi Lahan Pertanian Tembus 100 Ribu Hektare per Tahun. Mengutip informasi dari Kementerian Pertanian Dikutip dari <https://ekonomi.republika.co.id/berita/rnt9jv490/alih-fungsi-lahan-pertanian-tembus-100-ribu-hektare-per-tahun>
- Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi No. 2 Tahun 2016 tentang *Indeks Pembangunan Desa*.
- Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 9 Tahun 2021 tentang *Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan*.
- Raharjana, D.T. & Al Anshori, H.A. (2020). *Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Desa/Kampung Wisata di Indonesia*. Yogyakarta: Desa Wisata Institut.
- The World Bank (2020). *Resilient Tourism. Competitiveness in the Face of Disasters*. Washington D.C.: The World Bank.
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang *Kepariwisata*.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang *Desa*.
- Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*.
- UNESCO (2020). *Sustainable and Resilient Tourism*. Dikutip dari https://en.unesco.org/sites/default/files/info_sheet_sustainable_tourism.pdf
- UNWTO (2008). *International Recommendation for Tourism Statistics 2008*. Madrid: UNWTO.
- WEF (World Economic Forum) (2022). *Travel & Tourism Development Index 2021. Rebuilding for a Sustainable and Resilient Future*. Geneva: WEF.

KONTRIBUTOR

Henky Hermantoro	Penulis
Kontributor	
Wahyu Wijayanto	Direktur Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Kementerian PPN/Bappenas
Ignasius Angger Anindito	Koordinator Pariwisata, Direktorat Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Kementerian PPN/Bappenas
Muhammad Abdurrachman Rafi	Direktorat Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Kementerian PPN/Bappenas
Rizal Putra Munthe	Direktorat Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Kementerian PPN/Bappenas
Vania Daralsabila	Direktorat Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif Kementerian PPN/Bappenas
Ch. Dian Vitriani	The Deutsch Gessellschaft für Internationale Zusammenarbeit
A.B. Sadewa	Panorama Group
Hidayat al Banjari	Konsultan Pariwisata
Yani Adriani	P2Par ITB
Agus Suryono	Ketua Asosiasi Klaster Seluruh Indonesia
Purwanto	Asosiasi Klaster Seluruh Indonesia
Tatak Sariawan	Desa Wisata Candirejo, Jawa Tengah
Galuh Alif Rizki	Desa Wisata Tinalah, DI Yogyakarta
Pahrul Azim	Desa Wisata Bilebante, Nusa Tenggara Barat
Sugeng Handoko	Desa Wisata Nglanggeran, DI Yogyakarta

Penilaian Mandiri (Self Assessment) Desa Wisata Berketahanan

Definisi Desa Wisata menurut UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata adalah suatu bentuk integrasi antara potensi daya tarik wisata alam, wisata budaya, dan wisata hasil buatan manusia dalam satu kawasan tertentu dengan didukung oleh atraksi, akomodasi, dan fasilitas lainnya sesuai kearifan lokal masyarakat.

Terkait dengan hal tersebut Kementerian PPN/BAPPENAS akan menyusun indeks desa wisata berketahanan. Indeks ini tujuannya untuk:

1. Menyederhanakan jumlah indikator yang di nilai terfokus padahal hal terkait dengan ketersediaan data di desa, dan keterkaitannya dengan faktor-faktor yang relevan dengan mendorong ketahanan desa melalui pariwisata;
2. Memberikan kemudahan dalam penilaian sehingga dapat dilakukan penilaian mandiri;
3. Menjadikan indeks sebagai penilaian dasar bagi kinerja desawisata, yang dapat digunakan untuk menetapkan status desa, keberlanjutan pembangunan, dan pemberian penghargaan agar tidak terjadi tumpang tindih penilaian.
4. Mengkolaborasikan penilaian dengan penilaian desa mandiri (Kemendesa, PDT, dan Transmigrasi) agar terjadi kesesuaian tujuan akhir pembangunan desa mandiri yang berbasis pada ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi.

Survei ini bertujuan untuk mendapatkan masukan selaku pengelola desa wisata dan menginisiasi penilaian desa wisata dalam konsep desa wisata mandiri yang berketahanan.

Untuk itu, kami mohon Bapak/Ibu PIC di desa wisata yang masuk dalam Jadesta Kemenparekraf dapat membantu pengisian self assesment di bawah ini sebagai bagian dari penilaian desa wisata yang terdiri dari 4 (**empat**) **pilar yaitu Kelembagaan, Ekonomi, Sosial, dan Ekologi.**

Hormat Kami,

Direktorat Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kementerian PPN/Bappenas

* Menunjukkan pertanyaan yang wajib diisi

Penjelasan Pilar

Pilar kelembagaan merupakan pilar yang berfokus pada lembaga komunitas yang efektif dalam membangun koordinasi pembangunan antar pelaku untuk mencapai tujuan organisasi di desa wisata.

Pilar ekonomi mengacu pada pelestarian ekonomi tradisional berdasar pada adat istiadat, sejarah, dan kepercayaan turun temurun.

Pilar sosial menjelaskan bahwa pembangunan Desa Wisata Berketahanan bertumpu pada kekuatan otentisitas dan jati diri desa berupa karakteristik, tradisi, budaya, dan kearifan lokal.

Pilar ekologi merupakan pilar yang menjelaskan hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya untuk tujuan keberlanjutan pembangunan di desa wisata.

Biodata

1. Nama Lengkap *

2. Peran dan Posisi di Kepengurusan Desa *

3. Nama Desa *

4. Provinsi Desa *

5. Status Desa Wisata *

Tandai satu oval saja.

- Rintisan
- Berkembang
- Maju
- Mandiri
- Yang lain: _____

6. No Telepon *

7. Pekerjaan Lainnya (Jika Ada) *

Tandai satu oval saja.

- ASN
- Petani/Nelayan
- Pelaku Usaha Pariwisata
- Pelaku Usaha Non Pariwisata
- Pegawai Swasta
- Yang lain: _____

Kriteria 1.1: Keberadaan Lembaga

Kriteria ini terdiri dari 3 indikator.

Terdapat 5 jawaban yang mengartikan bahwa Jawaban 1 = kurang baik sampai dengan Jawaban 5 = sangat baik

8. 1.1.1 Bentuk lembaga pariwisata di desa *

Tandai satu oval saja.

- 1. Desa belum memiliki lembaga pariwisata yang dibentuk oleh komunitas
- 2. Desa sedang menyiapkan rencana pembentukan lembaga pariwisata
- 3. Desa sudah membentuk lembaga pariwisata namun belum disahkan oleh Kepala Desa
- 4. Kepala Desa telah mensahkan lembaga pariwisata
- 5. Bupati/dan atau Gubernur telah mensahkan lembaga pariwisata

9. 1.1.2 Tugas dan fungsi unit kerja *

Tandai satu oval saja.

- 1. Lembaga pariwisata belum terbentuk
- 2. Lembaga pariwisata sudah memiliki struktur organisasi namun belum menetapkan tugas dan fungsi unit kerja secara rinci
- 3. Lembaga pariwisata sudah memiliki struktur organisasi serta tugas dan fungsi namun belum diisi oleh personil tetap yang bertanggung jawab pada unit-unit kerjanya
- 4. Lembaga pariwisata sudah memiliki struktur organisasi dengan tugas dan fungsi serta personil lengkap tetapi belum disahkan melalui suatu SK
- 5. Lembaga pariwisata sudah memiliki struktur organisasi dengan tugas dan fungsi serta personil lengkap dan sudah disahkan melalui suatu SK

10. 1.1.3 Komitmen pengurus lembaga pariwisata di desa *

Tandai satu oval saja.

- 1. Ketua pengurus lembaga masih berasal dari luar desa
- 2. Ketua pengurus lembaga berasal dari desa namun masih mengangkat beberapa anggota dari luar desa karena masyarakat lokal belum memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan
- 3. Ketua dan tim pengurus lembaga berasal dari desa dan telah mampu menjalankan tugas dan fungsi lembaga dengan baik
- 4. Kepengurusan lembaga telah berjalan baik namun masih terbatas pada pelaksanaan tugas dan fungsi internal
- 5. Kepengurusan lembaga memiliki komitmen penuh dalam menjalankan tugas dan fungsinya dan mampu membangun koordinasi dengan para pemangku kegiatan lainnya

Kriteria 1.2 : Manajemen Organisasi

Kriteria ini terdiri dari 2 indikator.

Terdapat 5 jawaban yang mengartikan bahwa Jawaban 1 = kurang baik sampai dengan Jawaban 5 = sangat baik

11. 1.2.1 Rencana Kerja Organisasi *

Tandai satu oval saja.

- 1. Lembaga pariwisata belum ada visi misi yang secara eksplisit menjelaskan tujuan pembangunan pariwisata
- 2. Lembaga pariwisata sudah memiliki visi dan misi namun belum dijabarkan kedalam rencana program kerja
- 3. Lembaga pariwisata sudah memiliki program kerja namun belum disahkan oleh Kepala Desa
- 4. Lembaga pariwisata sudah disahkan namun belum disosialisasikan kepada masyarakat
- 5. Lembaga pariwisata sudah memiliki rencana aksi untuk 3 tahun yang menjelaskan rencana kerja dan biaya serta sudah disosialisasikan kepada masyarakat

12. 1.2.2 Monitoring dan Evaluasi *

Tandai satu oval saja.

- 1. Lembaga pariwisata tidak pernah melakukan monitoring
- 2. Lembaga pariwisata melakukan monitoring namun tidak tetap hanya bila ada masalah
- 3. Lembaga pariwisata telah melakukan monitoring namun belum melakukan evaluasi
- 4. Lembaga pariwisata sudah dilakukan monitoring dan evaluasi namun belum dilakukan tindakan perbaikan atas hasil evaluasi tersebut
- 5. Lembaga pariwisata sudah melakukan evaluasi dan tindakan perbaikan

Kriteria 1.3 : Efektivitas Organisasi

Kriteria ini terdiri dari 5 indikator.

Terdapat 5 jawaban yang mengartikan bahwa Jawaban 1 = kurang baik sampai dengan Jawaban 5 = sangat baik

13. 1.3.1 Ketersediaan sumber dana *

Tandai satu oval saja.

- 1. Desa tidak menyediakan sumber dana operasional sehingga lembaga pariwisata tidak dapat berjalan efektif
- 2. Masyarakat menyediakan dana secara swadaya namun tidak bersifat rutin
- 3. Desa, Kabupaten, Provinsi mengalokasikan dana guna menunjang dana swadaya masyarakat bagi pengembangan lembaga pariwisata
- 4. Desa, Kabupaten, Provinsi mendukung guna dana swadaya masyarakat guna pengembangan lembaga pariwisata
- 5. Desa, Kabupaten, Provinsi dan pihak swasta mendukung dana swadaya masyarakat guna pengembangan lembaga pariwisata

14. 1.3.2 Tersedianya dana dari Pemerintah Desa dalam mendukung kelembagaan pariwisata *

Tandai satu oval saja.

- 1. Desa tidak menyediakan Dana Bantuan Desa untuk operasional lembaga pariwisata
- 2. Desa hanya memberikan Dana Bantuan desa kepada lembaga pariwisata dalam bentuk BUMDes
- 3. Desa memberikan Dana Bantuan desa tidak hanya pada lembaga pariwisata dalam bentuk BUMDes namun juga koperasi dan pokdarwis
- 4. Desa memberikan Dana Bantuan Desa kepada lembaga desa dalam bentuk apapun hanya ketika kunjungan wisatawan telah meningkat
- 5. Desa memberikan Dana Bantuan Desa diberikan kepada lembaga pariwisata dalam bentuk apapun sejak pendiriannya secara rutin setiap tahun

15. 1.3.3 Pelaporan kegiatan lembaga pariwisata *

Tandai satu oval saja.

- 1. Lembaga pariwisata menyiapkan laporan hanya terbatas ditujukan kepada Kepala Desa
- 2. Lembaga pariwisata menyiapkan laporan ditujukan kepada Kepala Desa dan anggota lembaga
- 3. Lembaga pariwisata menyiapkan laporan kepada Kepala Desa, anggota lembaga, dan anggota masyarakat yang terlibat sebagai pemegang saham dalam usaha kegiatan pariwisata
- 4. Lembaga pariwisata menyiapkan laporan kepada Kepala Desa, anggota lembaga, dan seluruh masyarakat
- 5. Lembaga pariwisata menyiapkan laporan dilakukan kepada Kepala Desa, anggota lembaga, dan masyarakat dan dicantumkan salam website lembaga pariwisata

16. 1.3.4 Sumber daya manusia *

Tandai satu oval saja.

- 1. Lembaga pariwisata belum memiliki pengurus yang mendapatkan pelatihan manajemen kelembagaan
- 2. Hanya ketua lembaga yang pernah mendapatkan pelatihan manajemen kelembagaan
- 3. Ketua dan anggota pernah mendapatkan pelatihan manajemen kelembagaan minimal 1 kali
- 4. Ketua dan anggota pernah mendapatkan pelatihan manajemen kelembagaan minimal 2 kali
- 5. Ketua dan anggota pernah mendapatkan pelatihan manajemen minimal 3 kali

17. 1.3.5 Kemitraan dengan pelaku usaha *

Tandai satu oval saja.

- 1. Lembaga pariwisata belum melakukan kemitraan antar usaha pariwisata lokal
- 2. Lembaga pariwisata belum melakukan kemitraan antar usaha pariwisata dan usaha pendukung terkait lokal
- 3. Lembaga pariwisata belum membangun kemitraan lembaga antar desa
- 4. Lembaga pariwisata telah dibangun kemitraan dengan pelaku usaha pariwisata antar desa
- 5. Lembaga pariwisata telah membangun kemitraan dengan pelaku usaha pariwisata skala nasional

Kriteria 1.4: Manajemen Kepariwisata

Kriteria ini terdiri dari 3 indikator.

Terdapat 5 jawaban yang mengartikan bahwa Jawaban 1 = kurang baik sampai dengan Jawaban 5 = sangat baik

18. 1.4.1: Tersedianya rencana induk kepariwisataan desa *

Tandai satu oval saja.

- 1. Desa belum memiliki rencana induk kepariwisataan desa
- 2. Desa sedang dalam proses pembuatan rencana induk kepariwisataan desa
- 3. Desa telah menyiapkan rencana induk kepariwisataan namun belum disahkan secara formal sebagai dokumen desa
- 4. Desa telah mensahkan rencana induk kepariwisataan desa namun belum dilaksanakan
- 5. Desa telah mensahkan rencana induk kepariwisataan desa dan sudah dilaksanakan

19. 1.4.2: Manajemen destinasi pariwisata *

Tandai satu oval saja.

- 1. Lembaga pariwisata belum melakukan koordinasi program antar pelaku
- 2. Lembaga pariwisata sudah melakukan koordinasi namun belum dilakukan secara rutin
- 3. Lembaga pariwisata sudah memiliki perjanjian kerjasama antar pelaku di desa
- 4. Lembaga pariwisata sudah memiliki dokumen komitmen antar pelaku yang dinyatakan dalam kerjasama antar program
- 5. Lembaga pariwisata sudah mampu mengkoordinir kegiatan antar pelaku untuk menghasilkan produk pariwisata yang berdaya saing

20. 1.4.3: Manajemen Pengunjung *

Tandai satu oval saja.

- 1. Desa belum melakukan pendataan pengunjung
- 2. Desa sudah melakukan pendataan pengunjung namun belum memiliki pedoman kunjungan (manajemen kunjungan pada atraksi)
- 3. Desa telah menyiapkan pedoman kunjungan namun belum melakukan pengaturan kunjungan atas dasar kapasitas daya dukung lingkungan
- 4. Desa melakukan pengaturan kunjungan melalui cara manual
- 5. Desa melakukan pendataan dan pengawasan kunjungan melalui teknologi digital

Kriteria 2.1 Pelestarian Budaya Tak Benda

Kriteria ini terdiri dari 6 indikator.

Terdapat 5 jawaban yang mengartikan bahwa Jawaban 1 = kurang baik sampai dengan Jawaban 5 = sangat baik

21. 2.1.1 Event tradisi festival *

Tandai satu oval saja.

- 1. Tidak ada event tradisi di desa
- 2. Event tradisi hanya dirayakan terbatas pada lingkungan keluarga
- 3. Event tradisi dirayakan terbatas pada komunitas
- 4. Event tradisi dirayakan secara rutin namun belum menjadi atraksi wisata unggulan desa
- 5. Event tradisi dirayakan secara rutin dan telah menjadi atraksi wisata unggulan desa

22. 2.1.2 Sanggar Budaya Tradisional *

Tandai satu oval saja.

- 1. Tidak ada sanggar budaya di desa
- 2. Sanggar budaya di desa masih terbatas menjadi kegiatan di lingkungan keluarga
- 3. Sanggar budaya yang ada telah menjadi bagian dari kehidupan komunitas
- 4. Sanggar budaya yang ada telah menjadi bagian dari kehidupan komunitas namun belum menjadi bagian dari produk pariwisata
- 5. Sanggar budaya yang ada telah berkembang dan dikemas menjadi produk pariwisata

23. 2.1.3 Perlindungan terhadap kekayaan lokal *

Tandai satu oval saja.

- 1. Desa tidak pernah ikut serta menjaga kekayaan budaya lokal yang telah mendapatkan HAKI skala Nasional
- 2. Desa menjaga kekayaan HAKI nasional namun tidak pernah menginisiasi perlindungan terhadap kekayaan budaya lokal
- 3. Desa sedang melakukan inventarisasi HAKI lokal dan sedang dalam tahap penyusunan
- 4. Desa telah menyiapkan daftar perlindungan HAKI dan telah ditetapkan oleh Desa
- 5. Daftar HAKI desa ditetapkan dalam peraturan daerah Kabupaten

24. 2.1.4 Sanksi bagi pelanggaran norma budaya dan kearifan lokal *

Tandai satu oval saja.

- 1. Desa tidak pernah memberikan sanksi pada pengunjung yang melanggar norma budaya lokal
- 2. Desa memberikan teguran lisan kepada pengunjung bila melanggar norma budaya lokal
- 3. Desa memberikan informasi awal kepada pengunjung atas aturan norma budaya lokal melalui sarana informasi di desa
- 4. Desa memberikan informasi awal atas aturan norma budaya lokal dalam bentuk larangan dan ketentuan lain ("dos and donts") sebelum dan saat pengunjung datang ke desa
- 5. Desa memberikan sanksi tegas kepada pengunjung yang melanggar aturan yang ada sebagaimana tercantum dalam Peraturan Desa

25. 2.1.5 Interpretasi budaya lokal *

Tandai satu oval saja.

- 1. Interpretasi budaya lokal didapat dari tutur antar mulut ke mulut
- 2. Desa belum melakukan penelitian atas nilai kekayaan budaya lokal
- 3. Desa sudah melakukan pencatatan nilai budaya lokal namun belum dipublikasikan
- 4. Desa sudah mempublikasikan informasi budaya namun baru terinformasikan dikalangan terbatas
- 5. Desa telah menyebarkan interpretasi secara luas melalui situs desa dan menjadi rujukan pelaku usaha pariwisata dan pengunjung

26. 2.1.6 Dukungan penyelenggaraan even budaya *

Tandai satu oval saja.

- 1. Masyarakat melaksanakan even budaya lokal secara mandiri
- 2. Desa memberikan dukungan pada usaha swadaya masyarakat dalam mengangkat even budaya dan telah menjadi agenda tetap desa
- 3. Desa bersama masyarakat telah secara rutin menetapkan even budaya menjadi bagian dari promosi pariwisata
- 4. Kabupaten dan Desa telah mendukung usaha swadaya masyarakat untuk even budaya berkembang dalam skala regional
- 5. Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Desa, masyarakat, dan swasta bersama-sama mendukung even budaya menjadi even berskala nasional

Kriteria 2.2: Pelestarian Cagar Budaya

Kriteria ini terdiri dari 2 indikator.

Terdapat 5 jawaban yang mengartikan bahwa Jawaban 1 = kurang baik sampai dengan Jawaban 5 = sangat baik

27. 2.2.1 Inventarisasi benda cagar budaya *

Tandai satu oval saja.

- 1. Desa belum pernah melakukan inventarisasi benda cagar budaya yang terdapat di desa
- 2. Desa sedang melakukan inventarisasi benda cagar budaya
- 3. Desa sudah menetapkan daftar benda cagar budaya kedalam peraturan desa
- 4. Peraturan desa terkait cagar budaya sudah ditetapkan dalam peraturan daerah Kota/Kabupaten
- 5. Peraturan desa terkait cagar budaya sudah ditetapkan dalam peraturan daerah Provinsi/Nasional

28. 2.2.2 Peraturan Pengendalian Pelindungan Cagar Budaya *

Tandai satu oval saja.

- 1. Desa belum pernah melakukan inventarisasi benda cagar budaya (termasuk rumah tradisional) dan kawasan cagar budaya
- 2. Desa sedang melakukan inventarisasi benda dan kawasan cagar budaya
- 3. Desa sudah menetapkan peraturan perlindungan benda dan kawasan cagar budaya
- 4. Peraturan desa mengenai perlindungan benda dan kawasan cagar budaya sudah disahkan oleh Kabupaten
- 5. Peraturan desa mengenai perlindungan benda dan kawasan cagar budaya sudah disahkan oleh Kabupaten dan provinsi

Kriteria 2.3: Daya Dukung Sosial

Kriteria ini terdiri dari 4 indikator.

Terdapat 5 jawaban yang mengartikan bahwa Jawaban 1 = kurang baik sampai dengan Jawaban 5 = sangat baik

29. 2.3.1 Dampak sosial pembangunan pariwisata *

Tandai satu oval saja.

- 1. Masyarakat merasa terganggu oleh sikap pengunjung yang tidak menghormati norma dan budaya lokal
- 2. Masyarakat mengalami keresahan sosial akibat terjadinya komersialisasi budaya lokal
- 3. Masyarakat cenderung meniru gaya hidup (demonstration effect) pengunjung yang tidak sesuai dengan norma dan budaya lokal
- 4. Masyarakat mulai dapat menilai bahwa pengunjung dapat menyesuaikan diri dengan budaya lokal
- 5. Masyarakat merasakan manfaat besar dari pariwisata dengan berkembangnya ruang kreativitas dan sarana dan prasarana

30. 2.3.2 Tingkat kriminalitas *

Tandai satu oval saja.

- 1. Desa mengalami peningkatan jumlah kriminalitas yang dilakukan oleh pengunjung dan atau warga lokal
- 2. Masyarakat belum memiliki saluran laporan kasus yang dapat langsung berhubungan dengan aparat yang berwenang
- 3. Desa sudah merespon keluhan masyarakat namun keterbatasan jumlah aparat menyebabkan lambatnya proses penyelesaian kasus
- 4. Masyarakat masih memiliki ketergantungan tinggi pada aparat sehingga menyebabkan masalah yang ada tidak dapat segera diselesaikan
- 5. Masyarakat membentuk pengamanan swakarsa membantu tugas aparat

31. 2.3.3 Tingkat pelanggaran norma lokal *

Tandai satu oval saja.

- 1. Desa sering mengalami terjadinya pelanggaran norma oleh pengunjung yang selalu berulang
- 2. Desa tidak pernah memberikan sanksi atas pelanggaran norma lokal karena belum ada pedoman dan mekanisme penyelesaiannya
- 3. Desa sudah memberikan pedoman dalam bentuk "dos and donts" namun masih belum ada bentuk sanksi yang dapat diterapkan
- 4. Desa sudah memberikan sanksi tegas pada pelaku tindakan yang melanggar norma lokal
- 5. Desa saat ini mencatat relatif tidak terjadi pelanggaran norma dan etika lokal oleh pengunjung karena kesadaran mereka

32. 2.3.4 Interaksi antara pengunjung dengan tuan rumah *

Tandai satu oval saja.

- 1. Desa sering mencatat terjadinya konflik sosial antara pengunjung dengan masyarakat lokal
- 2. Desa mencatat bahwa pengunjung hanya sebatas sebagai tamu dan tidak pernah berinteraksi dengan masyarakat lokal
- 3. Desa mencatat bahwa pengunjung berkesempatan untuk berinteraksi dengan masyarakat lokal dalam even budaya
- 4. Desa mendorong pengunjung untuk mempelajari budaya lokal dan tertarik untuk kunjungan ulang
- 5. Desa mendorong pengunjung untuk mempelajari budaya lokal dan tertarik untuk kunjungan ulang

Kriteria 3.1 Menjaga Ekonomi Tradisional

Kriteria ini terdiri dari 3 indikator.

Terdapat 5 jawaban yang mengartikan bahwa Jawaban 1 = kurang baik sampai dengan Jawaban 5 = sangat baik

33. 3.1.1 Menjaga Ekonomi Tradisional *

Tandai satu oval saja.

- 1. Sebagian besar masyarakat desa memilih beralih dari mata pencaharian tradisional ke pariwisata
- 2. Sebagian besar masyarakat desa menjadikan pariwisata sebagai tujuan pembangunan desa dan mengubah arah pembangunan desa
- 3. Sebagian masyarakat desa mengubah aset sumber daya lokal ke fasilitas pariwisata terutama lahan pertanian
- 4. Sebagian besar masyarakat tetap bekerja pada basis ekonomi lokal dan usaha pariwisata dilakukan oleh pihak lain
- 5. Sebagian besar masyarakat tetap bekerja pada mata pencaharian basis ekonomi lokal dan menggunakan sektor pariwisata sebagai cara untuk meningkatkan kesejahteraan mereka

34. 3.1.2 Pemanfaatan produk lokal dalam mendukung usaha pariwisata *

Tandai satu oval saja.

- 1. Masyarakat desa masih menjual produk dalam bentuk bahan baku ke luar daerah bagi kebutuhan konsumen diluar daerah
- 2. Masyarakat mengolah terlebih dahulu produk lokal (terutama pertanian dan perkebunan) untuk menjadi produk baru dengan nilai tambah yang dapat dikonsumsi di desa dan juga di ekspor
- 3. Masyarakat belum mendayagunakan produk lokal menjadi bagian dari bagian dari paket wisata
- 4. Lembaga pariwisata dapat mengemas produk lokal menjadi bagian dari paket wisata
- 5. Lembaga pariwisata mampu memperkuat rantai nilai antar produk lokal melalui kerjasama antar pemangku kegiatan

35. 3.1.3 Pengembangan dan pemanfaatan teknologi dalam promosi produk lokal *

Tandai satu oval saja.

- 1. Masyarakat belum menjual produk lokal sebagai dalam kemasan dengan nilai tinggi
- 2. Masyarakat mulai dapat mengemas produk lokal dan di ekpor ke luar daerah namun masih dalam bentuk transaksi secara tradisional
- 3. Masyarakat mulai mengemas produk lokal tidak hanya untuk ekspor namun juga bagi konsumsi pengunjung (wisatawan)
- 4. Masyarakat mulai dapat menjual kemasan produk lokal melalui e-commerce yang dikelola oleh lembaga pariwisata desa
- 5. Lembaga pariwisata dapat mempromosikan produk lokal bekerjasama dengan e-commerce skala nasional

Kriteria 3.2 Dampak Terhadap Ekonomi Lokal

Kriteria ini terdiri dari 3 indikator.

Terdapat 5 jawaban yang mengartikan bahwa Jawaban 1 = kurang baik sampai dengan Jawaban 5 = sangat baik

36. 3.2.1 Penciptaan lapangan kerja langsung dan Tidak ada langsung *

Tandai satu oval saja.

- 1. Desa tidak merasakan terciptanya lapangan kerja baru akibat pariwisata bagi masyarakat lokal
- 2. Desa mencatat terciptanya lapangan kerja baru terbatas pada pelaku usaha pariwisata langsung
- 3. Desa mencatat lapangan kerja baru terbatas pada pelaku usaha pariwisata langsung dan tidak langsung pada sektor lain pendukung pariwisata
- 4. Desa mencatat bahwa pariwisata dapat mendorong pengembangan UMKM desa terkait langsung dan pendukung pariwisata
- 5. Desa mencatat terciptanya lapangan kerja baru lebih luas tidak terbatas area desa wisata yang bersangkutan

37. 3.2.2 Peningkatan Pendapatan Masyarakat *

Tandai satu oval saja.

- 1. Desa merasakan tidak terjadinya dampak peningkatan pendapatan masyarakat yang signifikan dengan berkembangnya pariwisata
- 2. Desa mencatat terjadinya dampak positif peningkatan pendapatan masyarakat namun terbatas bagi mereka yang bekerja langsung di usaha pariwisata
- 3. Desa merasakan berkembangnya pariwisata telah mendorong ide kreatif usaha yang memberikan dampak positif bagi peningkatan pendapatan masyarakat yang bekerja di bidang pariwisata
- 4. Desa mencatat terjadi dampak positif lebih luas bagi masyarakat tidak terbatas mereka yang berusaha di bidang jasa pariwisata namun juga produk-produk pendukungnya
- 5. Desa menerima dampak positif pariwisata yang berhasil mengurangi angka kemiskinan di desa

38. 3.2.3 Eksistensi UMKM Pariwisata *

Tandai satu oval saja.

- 1. UMKM pariwisata tidak dapat bersaing dengan pengusaha luar dalam mendukung pariwisata
- 2. UMKM barang dan jasa terkait pariwisata banyak yang bangkrut akibat terjadinya persaingan tidak sehat dengan penyedia barang dan jasa skala menengah dan besar
- 3. UMKM pariwisata dapat menjadi bagian dari bisnis pariwisata namun kurang mendapatkan keuntungan yang seimbang
- 4. UMKM pariwisata mulai memiliki kemampuan dalam pemanfaatan teknologi digital guna mempromosikan produknya baik untuk konsumsi lokal maupun ekspor
- 5. Lembaga pariwisata dapat memperkuat kemitraan antar UMKM dan usaha menengah besar guna mendukung produk pariwisata

Kriteria 3.3 Perlindungan terhadap usaha dan tenaga kerja lokal

Kriteria ini terdiri dari 5 indikator.

Terdapat 5 jawaban yang mengartikan bahwa Jawaban 1 = kurang baik sampai dengan Jawaban 5 = sangat baik

39. 3.3.1 Akses tenaga kerja lokal dalam usaha pariwisata *

Tandai satu oval saja.

- 1. Desa masih mencatat pelaku usaha pariwisata banyak menggunakan tenaga kerja luar
- 2. Desa mencatat bahwa pelaku usaha lokal belum dapat memenuhi klasifikasi untuk dapat bersaing dengan tenaga luar
- 3. Desa mengidentifikasi bahwa tenaga kerja lokal terbatas sebagai penerima tamu
- 4. Desa telah mendorong usaha pariwisata untuk mendayagunakan tenaga kerja lokal dalam mengisi kebutuhan yang diperlukan
- 5. Desa menetapkan pelaku usaha lokal mendapat privilege dalam menjalankan usaha mereka antara lain dalam bentuk proporsi saham dan jenis usaha yang dilindungi bagi usaha lokal

40. 3.3.2 Pelatihan bagi SDM lokal untuk dapat memasuki pasar kerja pariwisata *

Tandai satu oval saja.

- 1. SDM lokal tidak pernah mendapat pelatihan secara khusus sebagaimana dibutuhkan dalam pembangunan sektor pariwisata
- 2. SDM lokal masing-masing mencari sumber pengetahuan sendiri
- 3. Pemerintah Desa dan Kabupaten telah melakukan pelatihan bagi SDM lokal bidang usaha pariwisata
- 4. Pemerintah Provinsi telah melakukan pelatihan bagi SDM lokal bidang usaha pariwisata
- 5. Pemerintah/dan atau akademisi dan swasta telah melakukan pelatihan SDM lokal bidang usaha pariwisata sehingga peluang kerja SDM lokal semakin luas

41. 3.3.3 Kesetaraan gender dan disabilitas *

Tandai satu oval saja.

- 1. Desa mencatat masih ada diskriminasi gender dan disabilitas bagi peluang pasar kerja di sektor pariwisata
- 2. Desa mendorong terwujudnya wisata inklusif yang memberikan peluang kerja yang sama bagi kesetaraan gender dan disabilitas
- 3. Desa belum memberikan perhatian khusus bagi pengunjung disabilitas dalam berkegiatan
- 4. Tidak ada diskriminasi gender dan penyandang disabilitas atas peluang kerja bagi masyarakat ataupun pengunjung
- 5. Memberikan dukungan inklusivitas dalam bentuk peraturan desa dan atau daerah

42. 3.3.4 Perlindungan kepemilikan usaha bagi warga lokal (*privilege*) *

Tandai satu oval saja.

- 1. Desa membuka peluang investasi luar di buka seluas-luasnya sehingga menekan usaha lokal
- 2. Desa mencatat terjadinya keluhan pelaku usaha lokal akibat tidak dapat bersaing dengan pelaku usaha dari luar
- 3. Desa belum mempunyai peraturan khusus yang menjamin iklim kondusif bagi persaingan usaha
- 4. Desa sudah membuat kesepakatan di tingkat desa yang memberikan himbauan pada pelaku usaha luar untuk memperhatikan peran usaha lokal
- 5. Kabupaten menerbitkan peraturan daerah Kabupaten yang mengatur perlindungan usaha bagi masyarakat lokal

43. 3.3.5 Keluhan masyarakat atas adanya kompetisi usaha yang tidak sehat *

Tandai satu oval saja.

- 1. Desa mencatat berkembangnya investor luar bidang pariwisata telah mendesak usaha lokal
- 2. Desa mencatat perkembangan pariwisata telah menyebabkan konflik antar usaha lokal karena tidak meratanya peluang yang ada
- 3. Desa belum menyediakan saluran atas keluhan masyarakat menghadapi persoalan diatas
- 4. Kepala Desa dapat segera menyelesaikan persoalan yang ada secara cepat dengan memberikan himbauan dan peringatan kepada para pelaku
- 5. Desa membuat peraturan yang mengatur agar supaya tidak terjadi konflik antar usaha

Kriteria 4.1 Pelestarian Alam dan Sujana (*Cultural Heritage*)

Kriteria ini terdiri dari 3 indikator.

Terdapat 5 jawaban yang mengartikan bahwa Jawaban 1 = kurang baik sampai dengan Jawaban 5 = sangat baik

44. 4.1.1 Zonasi untuk perlindungan sumber daya desa *

Tandai satu oval saja.

- 1. Desa belum membuat rencana zonasi ruang berbasis perlindungan fungsi dan nilai ruang
- 2. Desa telah menyiapkan rencana zonasi dengan melibatkan seluruh pemangku kegiatan di desa
- 3. Desa telah mensahkan rencana zonasi melalui Peraturan Desa
- 4. Kabupaten memperkuat penetapan peraturan desa mengenai rencana zonasi
- 5. Desa menyiapkan aturan turunan teknis pelaksanaan rencana zonasi

45. 4.1.2 Pengawasan pembangunan fasilitas pariwisata *

Tandai satu oval saja.

- 1. Desa tidak pernah melakukan pengawasan atas pembangunan fasilitas pariwisata
- 2. Desa melakukan pengawasan namun tidak dengan dasar regulasi sehingga diabaikan
- 3. Desa menyiapkan syarat pemberian izin pendirian fasilitas pariwisata atas rekomendasi Kepala Desa berdasar rencana zonasi yang ada
- 4. Desa mengajukan syarat dasar pemberian izin pembangunan fasilitas pariwisata tersebut kepada Kabupaten untuk memperkuat peraturan desa
- 5. Kabupaten mensahkan peraturan izin membangun fasilitas pariwisata atas fungsi dan nilai ruang melalui Perda Kabupaten

46. 4.1.3 Kegiatan pemulihan kerusakan lingkungan oleh pengunjung *

Tandai satu oval saja.

- 1. Pengunjung dan masyarakat tidak peduli pada pemulihan lingkungan
- 2. Pengunjung sekedar berwisata dan masyarakat yang bergerak untuk pelestarian
- 3. Pengunjung bersama masyarakat aktif bekerjasama memperbaiki kerusakan lingkungan
- 4. Lembaga pariwisata menyiapkan konsep pedoman pelestarian lingkungan untuk dapat di sahkan oleh Desa
- 5. Para pihak telah melaksanakan ketentuan pelestarian dan pemulihan kualitas lingkungan sesuai dengan peraturan desa

Kriteria 4.2 Kapasitas Daya Dukung Lingkungan

Kriteria ini terdiri dari 2 indikator.

Terdapat 5 jawaban yang mengartikan bahwa Jawaban 1 = kurang baik sampai dengan Jawaban 5 = sangat baik

47. 4.2.1 Keluhan masyarakat terhadap kerusakan alam *

Tandai satu oval saja.

- 1. Masyarakat sering mengeluhkan tentang kerusakan alam namun tidak tahu kemana harus disampaikan keluhannya
- 2. Masyarakat sudah menyampaikan keluhannya melalui pengurus Desa namun tidak ada tanggapan
- 3. Masyarakat mendapat respon dari desa namun dalam waktu lama
- 4. Desa menyiapkan aplikasi untuk menerima keluhan masyarakat atas dampak pariwisata terhadap kerusakan lingkungan
- 5. Masyarakat mendapat ruang untuk menampung keluhan yang direspon lebih cepat

48. 4.2.2 Pedoman penetapan kegiatan agar tidak melampaui batas ambang kapasitas daya dukung lingkungan *

Tandai satu oval saja.

- 1. Desa belum mengeluarkan pedoman bagi pengunjung atas apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam membatasi jumlah dan kegiatan di lokasi
- 2. Desa sudah mengeluarkan himbauan namun belum dalam bentuk pedoman tetap
- 3. Desa dalam proses penyiapan aturan mengenai batas ambang jumlah kunjungan dan jenis kegiatan wisata yang berpotensi merusak lingkungan
- 4. Desa menetapkan peraturan atas pedoman apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pengunjung ketika berwisata di desa
- 5. Desa sudah memberlakukan pengaturan ketat dan sanksi di lapangan bagi pengelola atraksi atas dasar peraturan yang ada

Kriteria 4.3 Manajemen Risiko

Kriteria ini terdiri dari 5 indikator.

Terdapat 5 jawaban yang mengartikan bahwa Jawaban 1 = kurang baik sampai dengan Jawaban 5 = sangat baik

49. 4.3.1 Kesiagaan menghadapi risiko bencana alam, non alam, sosial termasuk aktivitas pengunjung *

Tandai satu oval saja.

- 1. Desa belum menyiapkan manajemen risiko sehingga bersifat reaktif ketika terjadi bencana
- 2. Desa bersifat pasif ketika terjadi bencana dan penanganannya diserahkan sepenuhnya kepada pihak yang berkompeten (BNPB)
- 3. Masyarakat dilibatkan dalam penanganan bencana bersama aparat desa dan BNPB
- 4. Desa bersama instansi terkait menyiapkan manajemen risiko yang menjelaskan prosedur penanganan bencana dan tata cara pelaksanaannya
- 5. Desa bersama masyarakat dan instansi terkait melaksanakan manajemen risiko yang melibatkan segenap pelaku pariwisata

50. 4.3.2 Kualitas Udara *

Tandai satu oval saja.

- 1. Desa belum membuat kebijakan yang mengatur kegiatan berpotensi penyebab polusi udara (pembakaran sampah, transportasi dsb)
- 2. Desa menyiapkan aturan atas pembatasan kegiatan yang berpotensi menyebabkan polusi udara
- 3. Desa menetapkan larangan kegiatan pembakaran sampah ketika Indeks kualitas udara tercatat diatas 100 (diukur melalui aplikasi android)
- 4. Desa melakukan pengetatan jenis moda transportasi berbahan bakar fosil ketika indeks kualitas udara tercatat antara 50-100 (diukur melalui aplikasi android)
- 5. Desa menyiapkan pemberian penghargaan kepada pelaku yang mematuhi peraturan tersebut

51. 4.3.3 Penanganan Sampah *

Tandai satu oval saja.

- 1. Desa belum mengalokasikan anggaran guna penyediaan sarana pembuangan sampah di lokasi yang menjadi kunjungan wisatawan atau pengunjung lainnya
- 2. Desa belum menetapkan adanya sistem penanganan sampah yang terkoordinir
- 3. Desa belum membuat larangan pembuangan sampah sembarangan bagi pengunjung yang melekat pada promosi pariwisata
- 4. Desa telah memiliki sistem pengelolaan sampah yang melibatkan partisipasi warga dan pengunjung
- 5. Desa mendorong penggunaan teknologi pengelolaan sampah yang dapat menghasilkan manfaat seperti biogas dan magot

52. 4.3.4 Kualitas Air *

Tandai satu oval saja.

- 1. Masyarakat masih sulit mendapatkan air bersih
- 2. Masyarakat mendapatkan kondisi air sumur yang keruh dan berbau
- 3. Masyarakat melihat adanya air sungai dan danau yang terlihat keruh, berbau, dan tumbuh enceng gondok
- 4. Masyarakat dapat menemui lagi ikan dan binatang lainnya di sungai
- 5. Masyarakat memiliki ketersediaan air sungai dan sumur yang memenuhi standar layak untuk dikonsumsi

53. 4.3.5 Polusi Visual *

Tandai satu oval saja.

- 1. Pengunjung merasakan pembangunan fisik seperti hotel, restoran, baliho, dan tempat swafoto menutup lanskap pedesaan sehingga mengurangi nilai keindahan desa
- 2. Desa belum melakukan aturan pembangunan terkait dengan problem visual
- 3. Desa sudah menetapkan aturan pembangunan bagian dari rencana zonasi namun belum diterapkan pelaksanaannya
- 4. Desa sudah menerapkan aturan pembangunan agar tidak merusak lanskap perdesaan
- 5. Pengunjung dapat menikmati lanskap perdesaan tanpa gangguan visual

Terima kasih atas kesediaan Bapak/ Ibu dalam mengisi kuesioner ini dan atas informasi yang diberikan.

Kami berharap informasi yang diberikan Bapak/ Ibu dapat menjadi masukan dan acuan bagi kami untuk mencapai tujuan penelitian.

Hormat Kami,
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Direktorat Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.

Google Formulir